



**PENGARUH KAPASITAS INVESTASI DOMESTIK DAN
KEMISKINAN PADA PENINGKATAN INDIKATOR
PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:
Mohamad Miftahur Royan
NIM 110810101087

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PENGARUH KAPASITAS INVESTASI DOMESTIK DAN
KEMISKINAN PADA PENINGKATAN INDIKATOR
PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
Mohamad Miftahur Royan
NIM 110810101087

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan piji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Istiqomah dan Ayahanda Moh. Dimiyati tercinta, yang memberi kasih sayang, doa dan pengorbanan selama ini;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Adikku tersayang Roiq Akbar Marzuki yang selalu aku banggakan;
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

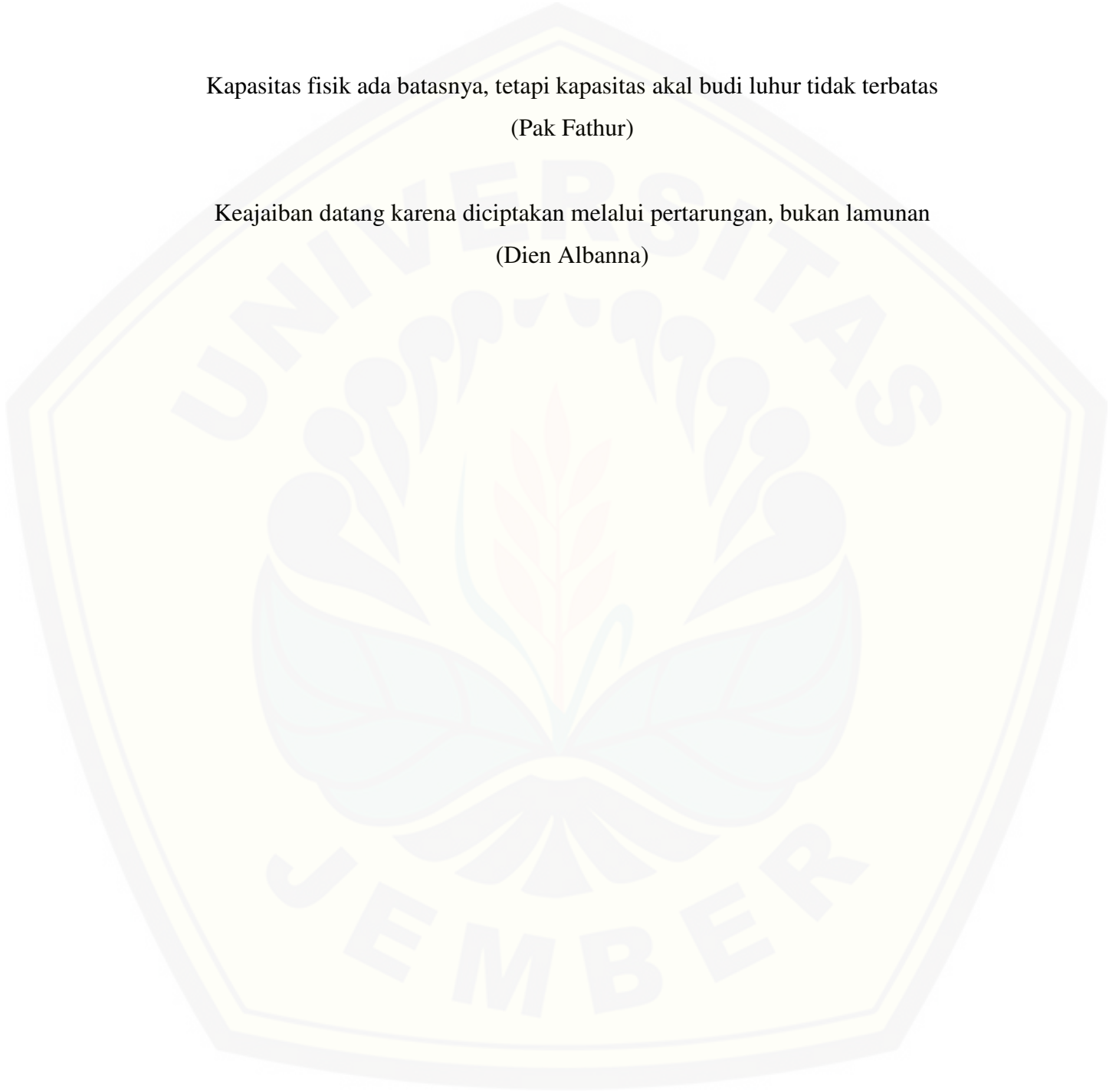
MOTTO

Kapasitas fisik ada batasnya, tetapi kapasitas akal budi luhur tidak terbatas

(Pak Fathur)

Keajaiban datang karena diciptakan melalui pertarungan, bukan lamunan

(Dien Albanna)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Mohamad Miftahur Royan

NIM : 110810101087

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : ” Pengaruh Kapasitas Investasi Domestik dan Kemiskinan pada Peningkatan Indikator Pembangunan Manusia di Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2015

Yang menyatakan,

Mohamad Miftahur Royan

110810101087

SKRIPSI

**PENGARUH KAPASITAS INVESTASI DOMESTIK DAN
KEMISKINAN PADA PENINGKATAN INDIKATOR
PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR**

Oleh:

Mohamad Miftahur Royan

110810101087

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Aisah Jumiati, S.E., M.P.

Dosen Pembimbing Pendamping : Fajar Wahyu P, S.E., M.E.

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kapasitas Investasi Domestik dan Kemiskinan
pada Peningkatan Indikator Pembangunan Manusia di Jawa
Timur
Nama Mahasiswa : Mohamad Miftahur Royan
NIM : 110810101087
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan : 16 Juni 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Aisah Jumiati, S.E., M.P.

NIP. 19680926199403 2 002

Fajar Wahyu P, S.E., M.E.

NIP. 198103302005011 003

Ketua Jurusan,

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes.

NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH KAPASITAS INVESTASI DOMESTIK DAN KEMISKINAN PADA
PENINGKATAN INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mohamad Miftahur Royan
NIM : 110810101087
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

26 Juni 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dra. Anifatul Hanim M.Si (.....)
NIP. 19650730199103 2 00 1
2. Sekretaris : Prof. Dr. Sarwedi M.M (.....)
NIP. 19531015198303 1 00 1
3. Anggota : Dr.Siti Komariyah S.E., M.Si (.....)
NIP. 19710610200112 2 00 2

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si
NIP. 19630614199002 1 001

*Pengaruh Kapasitas Investasi Domestik dan Kemiskinan pada Peningkatan
Indikator Pembangunan Manusia di Jawa Timur*

Mohamad Miftahur Royan

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Jawa Timur relatif kecil dibanding dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi. Kesejahteraan merupakan produk pembangunan yang melibatkan kegiatan pemerintah dan swasta dalam berbagai bidang. Pemerintah sebagai agen pembangunan memiliki beberapa fungsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas investasi domestik dan kemiskinan terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia dan mengetahui peran mana yang lebih besar antara swasta dan pemerintah dilihat dari besaran investasi yang mempengaruhi IPM. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis, diketahui investasi publik sangat berperan terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Bondowoso, sedangkan di Kabupaten Mojokerto yang mempengaruhi peningkatan IPM adalah investasi swasta. Hasil regresi linier berganda disimpulkan bahwa variabel kapasitas investasi domestik dan kemiskinan berpengaruh signifikan.

Kata kunci : Pembangunan manusia, kapasitas investasi domestik, kemiskinan.

*Pengaruh Kapasitas Investasi Domestik dan Kemiskinan pada Peningkatan
Indikator Pembangunan Manusia di Jawa Timur*

Mohamad Miftahur Royan

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRACT

Human development can be measured by the Human Development Index (HDI). HDI of East Java is relatively small compared with the high economic growth. Welfare is a product development involving government and private activities in various fields. Government as agents of development has several functions in order to build a prosperous society. This study aims to determine the effect of domestic investment capacities and poverty on the increase in human development indicators and know which one is bigger roles between the private and government from the amount of investments that affect the HDI. The analytical method used is multiple linear regression. Based on the analysis, known to public investment greatly contributes to an increase in the HDI in Bondowoso, whereas in Mojokerto which affects the increase in the HDI is private investment. Multiple linear regression results concluded that the variable capacity of domestic investment and poverty have a significant effect.

Key words : *Human development, domestic investment capacity, poverty*

RINGKASAN

Pengaruh Kapasitas Investasi Domestik dan Kemiskinan pada peningkatan Indikator Pembangunan Manusia di Jawa Timur; Mohamad Miftahur Royan, 110810101087; 2015: 75 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Kesejahteraan dapat dilihat dari nilai indikator pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari tiga komponen (1) Kesehatan, diukur dengan angka harapan hidup (AHH), (2) Pendidikan, diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan angka partisipasi pendidikan yang telah ditamatkan atau rata-rata lama sekolah (RLS) dan (3) Ekonomi, diukur dengan standar hidup yang layak dengan pendekatan produk domestik regional bruto per kapita pada tingkat konsumsi riil perkapita atau kemampuan daya beli masyarakat.

Kesejahteraan merupakan produk pembangunan yang melibatkan kegiatan pemerintah dan swasta dalam berbagai bidang. Pemerintah sebagai agen pembangunan memiliki beberapa fungsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pemerintah sebagai agen pembangunan memiliki beberapa fungsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pertama adalah fungsi alokasi, dengan jumlah sumberdaya yang terbatas akan dapat diperoleh hasil yang optimal. Kedua adalah fungsi distribusi, yang dimaksudkan agar sumberdaya dan hasil-hasil pembangunan dapat dipergunakan dan dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Ketiga adalah fungsi dinamisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga lebih dinamis dan berkembang, terakhir adalah fungsi stabilisasi, diharapkan pemerintah mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial serta politik, sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara lebih pasti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas investasi domestik dan kemiskinan terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia dan bagaimana peran swasta dan pemerintah di masing-masing kabupaten/kota di Jawa

Timur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda (OLS). Berdasarkan hasil regresi linier berganda disimpulkan bahwa variabel kapasitas investasi domestik yaitu investasi swasta berpengaruh positif signifikan dan PMDN berpengaruh negatif signifikan sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso peningkatan IPM lebih dipengaruhi oleh peran pemerintah dari pada peran swasta sedangkan di Kabupaten Mojokerto peran swasta lebih besar daripada peran pemerintah dalam mempengaruhi peningkatan IPM.

PRAKATA

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kapasitas Investasi Domestik dan Kemiskinan Pada Peningkatan Indikator Pembangunan Manusia Di Jawa Timur”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Aisah Jumiati, S.E., M.P. dan Bapak Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat pada penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Sebastiana V, M.Kes, selaku Ketua Jurusan Ilmu Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan;
3. Bapak Dr. M. Fathorrazi, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Bapak Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa;
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember, khususnya Jurusan IESP yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis sampai akhir penyelesaian skripsi ini;
6. Orang tua terbaik, Ibunda Istiqomah dan Ayahanda Moh. Dimiyati yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, nasehat dan kerja keras yang tidak pernah putus untuk penulis;

7. Adikku Roiq Akbar Marzuki, yang telah memberikan dukungan dan semangat;
8. Nenek dan keluarga besar di Banyuwangi atas doa, bantuan, dukungan, motivasi yang selalu diberikan;
9. Riria Hendarto Putri yang selalu memberikan motivasi, semangat, perhatian, dukungan, bantuan dan doa;
10. Teman-teman Konsentrasi Regional angkatan 2011, Salindri, Putra, Wawan, Adel, yang telah memberikan segala bantuan, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis;
11. Keluarga Bapak Teduh TSW fasilitas, dukungan, bantuan sangat bermanfaat;
12. Mbah Paing yang selalu memberikan inspirasi;
13. Penghuni Basecamp Jl. Dewi Sartika 54 Jember, Mas din dan Sapok, yang selalu membantu menghilangkan penat saat penulisan skripsi ini. Trimakasih atas hari-hari yang menyenangkan;
14. Semua sahabat di PMII Rayon Ekonomi;
15. Saudara SH Terate Kom. Universitas Jember;
16. Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, semua kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi bidang Ekonomi terutama pada bagian Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Jember, 26 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi	6

2.1.2 Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	7
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah pada Perekonomian Makro	9
2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah pada Perekonomian Makro	11
2.1.5 Investasi	12
2.1.6 Teori Investasi.....	14
2.1.7 Kemiskinan	14
2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	18
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Konseptual	25
2.4 Hipotesis Penelitian	25
BAB 3. METODE PENELITIAN	26
3.1 Rancangan Penelitian	26
3.1.1 Jenis Penelitian	26
3.1.2 Unit Analisis	26
3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	26
3.3 Metode Analisis Data	27
3.3.1 Regresi Linier Berganda	27
3.3.2 Uji Statistik	29
3.3.3 Uji Asumsi Klasik	31
3.4 Definisi Variabel Operasional	33
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum	35
4.1.1 Keadaan Geografis Wilayah di Jawa Timur	35
4.1.2 Keadaan Demografis Wilayah di Jawa Timur	35
4.1.3 Kondisi Makro Ekonomi Jawa Timur.....	37
4.1.4 Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur	39
4.1.5 Usaha Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan	43

4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	46
4.2.2 Uji Statistik.....	47
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	49
4.2.3 Hasil Regresi Investasi Publik dan Investasi Swasta Terhadap IPM.....	52
4.3 Pembahasan.....	55
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012 menurut BPS Jawa Timur (2013)	3
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	24
4.1 Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun di Jawa Timur Tahun 2010 - 2013	36
4.2 Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha atas harga konstan pada tahun 2000, Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2013	38
4.3 Pertumbuhan IPM di Jawa Timur Tahun 2004-2013.....	40
4.4 Hasil Regresi Linier Berganda Pengaruh Kapasitas Investasi Domestik dan Kemiskinan terhadap IPM	46
4.5 Nilai Uji t pengaruh jumlah penduduk miskin, investasi swasta dan PMDN terhadap IPM	49
4.6 Uji Mutikolinieritas.....	51
4.7 Hasil Uji White	51
4.8 Hasil Uji Breusch-Godfrey	52
4.9 Hasil Regresi Investasi Publik dan Investasi Swasta terhadap IPM di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 PDRB Beberapa Provinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 (Miliar Rupiah) menurut BPS Indonesia (2014).....	2
2.1 Kerangka konseptual	25
4.1 Uji Normalitas (Sumber : Lampiran C).....	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Data IPM, jumlah penduduk miskin, investasi swasta, PMDN dan Investasi Publik kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2013	62
B. Hasil uji regresi data <i>cross section</i>	63
C. Uji Normalitas	64
D. Uji Multikolinearitas	65
E. Uji Heteroskedastisitas	66
F. Uji Autokorelasi	67
G. Hasil regresi setiap kabupaten/kota di Jawa Timur data <i>time series</i>	68

DAFTAR SINGKATAN



AHH	= Angka Harapan Hidup
AMH	= Angka Melek Huruf
RLS	= Rata-rata Lama Sekolah
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
UNDP	= <i>United Nations Development Programs</i>
GDP	= <i>gross domestic product</i>
IHK	= Indeks Harga Konsumen

BAB 1. PENDAHULUAN

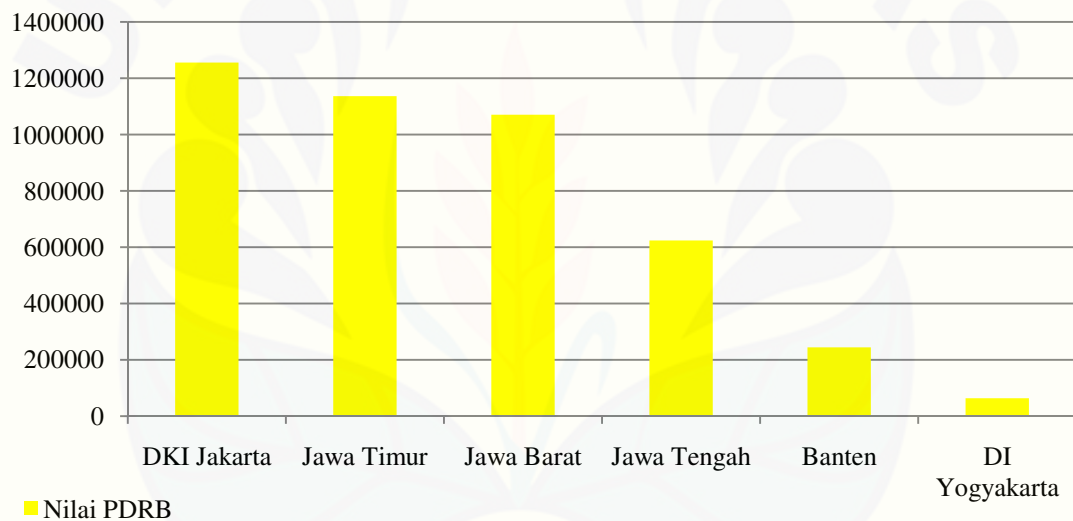
1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tiga komponen (BPS dan UNDP, 1997) dalam Sumiyati (2011) yaitu : (1) Kesehatan, diukur dengan angka harapan hidup (AHH), (2) Pendidikan, diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan angka partisipasi pendidikan yang telah ditamatkan atau rata-rata lama sekolah (RLS) dan (3) Ekonomi, diukur dengan standar hidup yang layak dengan pendekatan produk domestik regional bruto per kapita pada tingkat konsumsi riil perkapita atau kemampuan daya beli masyarakat. Pemerintah Jawa Timur merespon dengan lebih menfokuskan kearah kebijakan pembangunan agar peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nyata dan berkelanjutan dapat dicapai sehubungan dengan adanya otonomi daerah.

Kesejahteraan merupakan produk pembangunan yang melibatkan kegiatan pemerintah dan swasta dalam berbagai bidang. Pemerintah sebagai agen pembangunan memiliki beberapa fungsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pertama adalah fungsi alokasi, dengan jumlah sumberdaya yang terbatas akan dapat diperoleh hasil yang optimal. Kedua adalah fungsi distribusi, yang dimaksudkan agar sumberdaya dan hasil-hasil pembangunan dapat dipergunakan dan dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Ketiga adalah fungsi dinamisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga lebih dinamis dan berkembang, terakhir adalah fungsi stabilisasi, diharapkan pemerintah mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial serta politik, sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara lebih pasti. Meningkatnya peran pemerintah dapat dilihat dari besaran belanja pemerintah daerah. Belanja daerah Provinsi Jawa Timur mencapai Rp54,01 Triliun pada tahun 2012 dan meningkat mencapai Rp33,10 Triliun pada tahun 2013. Hal ini bisa diartikan bahwa pemerintah

daerah memiliki semangat yang diharapkan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (BPS Jawa Timur, 2014).

Jawa Timur merupakan Provinsi yang mempunyai tingkat pertumbuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut bisa dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi. PDRB Jawa Timur pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 1.136.326,87 Milyar, tetapi apabila dilihat secara nasional, IPM Jawa Timur pada tahun 2013 menempati urutan ke-18 yaitu sebesar 73,54 yang berarti Jawa Timur merupakan daerah yang masih berada pada kriteria menengah dan masih dibutuhkan peningkatan kesejahteraan manusia.



Gambar 1.1 PDRB Beberapa Provinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 (Miliar Rupiah) menurut BPS Indonesia (2014)

Sumber : BPS Indonesia, 2014

Kondisi IPM di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang sekiranya perlu diperhatikan agar IPM mengalami peningkatan yang lebih baik lagi. Komponen angka harapan hidup masih memerlukan adanya peningkatan mengingat kondisi kesehatan di masyarakat masih cukup rendah. Artinya, banyak

penduduk yang belum benar-benar memperhatikan kesehatan. Masalah ini apabila tidak diperhatikan secara serius maka akan berdampak pada penurunan angka harapan hidup yang akhirnya berdampak pada nilai IPM.

Tabel 1.1 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012 menurut BPS Jawa Timur (2013)

Kabupaten/Kota	2012	Kabupaten/Kota	2012
Pacitan	72,88	Magetan	73,85
Ponorogo	71,91	Ngawi	70,20
Trenggalek	74,09	Bojonegoro	67,74
Tulungagung	74,45	Tuban	69,18
Blitar	74,43	Lamongan	71,05
Kediri	72,72	Gresik	75,97
Malang	71,94	Bangkalan	65,69
Lumajang	69,00	Sampang	61,67
Jember	65,99	Pamekasan	66,51
Banyuwangi	70,53	Sumenep	66,41
Bondowoso	64,98	Kota Kediri	77,20
Situbondo	65,06	Kota Blitar	78,31
Probolinggo	64,35	Kota Malang	78,43
Pasuruan	69,17	Kota Probolinggo	75,44
Sidoarjo	77,36	Kota Pasuruan	74,33
Mojokerto	74,42	Kota Mojokerto	78,01
Jombang	73,86	Kota Madiun	77,50
Nganjuk	71,96	Kota Surabaya	78,33
Madiun	70,88	Kota Batu	75,42
		Jawa Timur	72,83

Sumber : BPS Jawa Timur, 2013

Nilai IPM kabupaten/kota di Jawa Timur menurut BPS Jawa Timur (2013) yaitu sebesar 72,83. Kota Malang menduduki nilai IPM tertinggi (78,43), disusul dengan kota Surabaya (78,33) dan kota Blitar (78,31). Kabupaten Sampang menduduki nilai IPM terendah di Jawa Timur (61,67).

Kenaikan IPM disebabkan adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota seperti program dibidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia yang dilihat dari nilai IPM, hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya. Misalnya, usaha peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) yang dimanifestasikan dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun,

hasilnya akan terasa pada beberapa tahun kemudian (RPJMD Jawa Timur 2014-2019).

IPM diantaranya dipengaruhi oleh kapasitas investasi domestik dan kemiskinan. Investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena investasi akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap, sehingga masyarakat yang sebelumnya menjadi pengangguran akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, daya beli masyarakat yang merupakan bagian dari komponen IPM juga akan meningkat. Pendapatan yang meningkat juga memungkinkan terlepasnya masyarakat dari kemiskinan (Sumanto, 2012).

Menurut Kuncoro (2000), apabila dilihat secara makro kemiskinan dapat terjadi karena perbedaan pola kepemilikan sumber daya sehingga akan menyebabkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan akan merugikan upaya pengurangan kemiskinan karena justru akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat akan mengakibatkan jumlah peningkatan IPM lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan pendapatan dalam masyarakat (Sumanto, 2012).

Teori kemiskinan berdasarkan penyebab terjadinya kemiskinan yang disebut dengan teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) menunjukkan bahwa kurangnya modal akan mengakibatkan rendahnya produktifitas. Produktifitas yang rendah akan berdampak pada rendahnya pendapatan. Pendapatan yang rendah akan mengakibatkan menurunnya jumlah tabungan dan investasi. Investasi yang rendah akan mengakibatkan terjadinya kekurangan modal dan seterusnya (Kuncoro, 2000). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang pengaruh kapasitas investasi domestik dan kemiskinan pada peningkatan indikator pembangunan manusia di Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan dan kapasitas investasi domestik terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh investasi publik dan investasi swasta terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, dengan batasan tertentu, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kapasitas investasi domestik dan kemiskinan terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi publik dan investasi swasta terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kapasitas investasi domestik, kemiskinan, dan indikator pembangunan manusia.
2. Bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam peningkatan indikator pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai referensi apabila melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sama, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan sebagai pembandingan dengan peneliti lainnya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi menurut Todaro dan Smith (2006) merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai macam perubahan mendasar dari struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi tersebut mencakup berbagai macam aspek seperti ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya, dimana aspek-aspek tersebut saling berkesinambungan dalam mencapai keberhasilan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Peran serta masyarakat maupun pemerintah sangat diperlukan guna mencapai keberhasilan pembangunan tersebut.

Pembangunan ekonomi juga diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian guna mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga terjadi peningkatan jumlah infrastruktur yang tersedia, meningkatnya jumlah perusahaan yang semakin berkembang serta meningkatnya taraf pendidikan dan teknologi. Perkembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat sehingga taraf kehidupan masyarakat juga akan semakin membaik (Sukirno, 2006).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur yang biasa digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara atau di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya peningkatan PDRB. Sumber

pertumbuhan ekonomi dapat meliputi berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi, namun sumber-sumber utama pertumbuhan ekonomi yaitu terdiri dari investasi-investasi yang dapat memperbaiki kualitas modal atau sumber daya fisik, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan adanya peningkatan produktivitas pada seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi (Todaro dan Smith, 2006).

2.1.2 Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Adam Smith

Teori ini lebih menekankan faktor produksi modal dan pemilik modal (kapitalis), karena pemilik modal mampu mengakumulasi modal yang diperoleh dari laba atau keuntungan usaha dan selanjutnya ditanamkan kembali sebagai perluasan atau tambahan produksi dan kapasitas produksi perusahaan. Adam Smith menganggap akumulasi modal (*capital acumulation*) sangatlah penting bagi pembangunan ekonomi. Cara terbaik dalam berinvestasi yaitu membeli mesin-mesin dan peralatan. Produktivitas tenaga kerja akan semakin meningkat seiring dengan adanya mesin modern/canggih. Peningkatan produktivitas akan mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi perusahaan sehingga *output* nasional juga akan ikut meningkat, hal tersebut berarti kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

b. Teori Todaro

Menurut Todaro (1999), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal (*capital accumulation*) mencakup semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal sumberdaya. Akumulasi modal akan terwujud apabila terdapat sebagian dari pendapatan yang ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan tujuan memperbesar *output* atau pendapatan dikemudian hari.

c. Teori Mc.Meer dan Bahri

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fungsi dari investasi dalam artian penanaman modal atau faktor ekonomi yang paling esensial dan mudah diukur secara kuantitatif, namun dalam dunia nyata, investor akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha dengan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan dari pemerintah. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multidimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasinya.

d. Teori Dumairy

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari proses pembangunan, sehingga untuk mengukur keberhasilan kinerja perekonomian tersebut, diantaranya dapat diukur dari nilai PDRB. PDRB mampu menggambarkan struktur ekonomi terhadap kinerja sektor perekonomian. Pemanfaatan data PDRB pada saat ini banyak digunakan dalam proses pengambilan suatu proses dan instrumen kebijakan, diantaranya yaitu digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga mampu mengurangi suatu kesenjangan, jumlah pengangguran dan kemiskinan, menilai dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian nasional maupun daerah, serta untuk melihat kesenjangan ekonomi antar daerah dan antar sektor guna peningkatan di masing-masing daerah.

e. Teori Budiono

Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan output perkapita dalam jangka panjang. Teori ini menekankan proses, karena dalam suatu proses mengandung unsur dinamis, perubahan maupun perkembangan. Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya selama pelita atau dekade tetapi dapat pula secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi biasanya juga dengan adanya perubahan struktur kesempatan kerja menurut sektor dan lapangan usaha.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah pada Perekonomian Makro

Pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y=C+I+G+(X-M)$ yang menurut pandangan kaum keynesian, akan ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya, misalnya dengan memperhitungkan sasaran yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Pengeluaran pemerintah yang diperbesar dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas tenaga kerja saja tidak akan efektif apabila tidak memperhitungkan sasaran siapa yang akan bekerja dan meningkat pendapatannya. Campur tangan pemerintah dalam hal perekonomian harus dibatasi agar tidak melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1997).

Pemerintah dalam melakukan kegiatan selalu membutuhkan pembiayaan, pembiayaan tersebut diperoleh dari penerimaan pemerintah. Pengeluaran Pemerintah yang berupa belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 13 tahun 2006, belanja langsung diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan nasional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014).

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil digunakan sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah maka pengeluaran yang dikeluarkan juga akan semakin besar. Pengeluaran pemerintah pada dasarnya bervariasi, namun secara garis besar menurut Syamsi (1994) dan Suparmoko (1996) dalam Tanjung (2007) dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Pengeluaran investasi yang merupakan tambahan kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa mendatang,
- b. Pengeluaran yang langsung berdampak kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,
- c. Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran masa mendatang,
- d. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengeluaran pemerintah daerah lebih didominasi oleh belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. Sebagai akibatnya, belanja langsung yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemenuhan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Perbandingan komposisi belanja daerah antara belanja tidak langsung dan belanja langsung di Jawa Timur pada tahun 2007 adalah sebesar 60% dan 40%. Perbandingan komposisi tersebut pada tahun anggaran 2008 berubah menjadi 55% dan 45%. Permasalahan lainnya yaitu intensitas pertumbuhan pendapatan daerah jauh lebih lambat dibandingkan intensitas pertumbuhan kebutuhan anggaran untuk pelayanan publik yang menyebabkan sulitnya perencanaan alokasi belanja untuk layanan publik. Sebagai akibatnya, belanja daerah untuk layanan publik menjadi kurang fokus terhadap pencapaian target pembangunan yang diharapkan (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014).

2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah pada Perekonomian Makro

a. Teori Adolf Wagner

Hukum Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Wagner menyebutkan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, terutama dalam hal mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya. Terdapat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan hukum Wagner, yaitu meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Teori Wagner didasarkan pada suatu teori yang disebut *Organic Theory of State*, yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain (Mangkoesobroto, 1993).

b. Teori Musgrave dan Rostow

Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadi perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadi pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi. Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan

bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasaranan ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat (Prasetya, 2012).

2.1.5 Investasi

Todaro dalam Tanjung (2007) menyatakan bahwa sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi dimasa yang akan datang disebut dengan investasi. Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi juga disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu tingkat keuntungan investasi yang diperkirakan akan diperoleh, tingkat bunga, perkiraan mengenai keadaan ekonomi di masa depan dan perubahan perkembangan teknologi.

Investasi secara umum di dalam pembangunan ekonomi menurut Nasution (1997) dalam Tanjung (2007) dibagi menjadi empat jenis, yaitu :

a. Investasi yang terdorong (*Included Investmen*) dan Investasi Otonom (*Autonomous Investment*)

Investasi yang terdorong adalah investasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan baik daerah ataupun pusat. Investasi ini diakibatkan adanya pertambahan permintaan yang disebabkan oleh pertambahan pendapatan. Apabila pendapatan bertambah maka pertambahan permintaan akan digunakan untuk tambahan konsumsi sehingga akan mendorong berdirinya pabrik baru atau perluasan pabrik lama untuk dapat memenuhi permintaan tersebut. Investasi otonom adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi ini tidak dilakukan oleh investor swasta karena di samping biayanya yang sangat besar, investasi ini juga tidak memberikan keuntungan. Besar kecilnya investasi tidak

dipengaruhi oleh pendapatan, baik pendapatan daerah maupun pusat dan dapat berubah dengan adanya perubahan faktor-faktor di luar pendapatan seperti tingkat teknologi, kebijakan pemerintah, harapan para pengusaha dan lain sebagainya. Contohnya adalah pembukaan dan pembangunan prasarana jalan.

b. Investasi Publik (Public Investment) dan Investasi Swasta (Private Investment)

Investasi Publik adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh swasta yang menjadikan keuntungan sebagai prioritas utama. Hal ini berbeda dengan investasi publik yang diarahkan untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

c. Investasi Domestik (Domestic Investment) dan Investasi Asing (Foreign Investment)

Investasi domestik adalah penanaman modal dalam negeri, sedangkan investasi asing adalah penanaman modal asing. Suatu daerah yang memiliki banyak faktor-faktor produksi alam namun tidak memiliki faktor produksi modal (*capital*) yang cukup untuk mengolah sumber-sumber yang ada, maka akan mengundang modal asing untuk dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

d. Investasi Bruto (Gros Investment) dan Investasi Netto (Net Investment)

Investasi bruto adalah total seluruh investasi yang diadakan atau dilaksanakan pada suatu waktu yang mencakup segala jenis investasi, baik itu *autonomous* maupun *induced*, baik *private* maupun *public*, artinya seluruh investasi yang dilakukan di suatu daerah selama suatu periode waktu tertentu. Investasi netto adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. Sebagai contoh, investasi bruto pada saat ini sebesar Rp 25.000.000,00 sedangkan penyusutan yang terjadi selama tahun sebelumnya adalah Rp 10.000.000,00, maka investasi netto adalah sebesar Rp 15.000.000,00.

2.1.6 Teori Investasi

a. Teori Klasik

Menurut ahli ekonomi klasik, investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga dimana semakin tinggi tingkat bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin menurun. Hal tersebut berkaitan dengan alasan seorang pengusaha yang akan menambah pengeluaran investasi apabila keuntungan yang diharapkan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga yang harus dibayar sebagai ongkos penggunaan dana (*Cost Of Capital*). Semakin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan semakin terdorong untuk melakukan investasi karena biaya penggunaan dana juga akan semakin kecil (Nopirin, 2000).

Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai perubahan-perubahan tersebut dapat dengan mudah berlaku terhadap tingkat bunga yang akan menjamin terciptanya keseimbangan antara jumlah tabungan dari sektor rumah tangga dan jumlah investasi yang dilakukan pengusaha. Hal tersebut dikarenakan tingkat bunga akan menentukan besarnya jumlah tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam sektor perekonomian. Perubahan-perubahan dalam tingkat bunga akan terus berlangsung hingga keseimbangan antara jumlah tabungan dan jumlah investasi dapat tercapai. Jumlah investasi minimum dalam perekonomian diusahakan sama dengan jumlah tabungan. Investasi tersebut dapat berasal baik dari investasi publik maupun investasi swasta.

b. Teori Neo Klasik

Menurut teori ini besarnya modal yang akan diinvestasikan dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marjinal dibandingkan dengan tingkat harga. Suatu investasi akan dijalankan apabila pendapatan investasi lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga dan investasi dalam suatu barang modal, dengan demikian terdapat tiga unsur penting yang harus diperhitungkan dalam menentukan investasi, yaitu: tingkat biaya barang modal, tingkat bunga dan tingginya pendapatan yang akan diterima. Perubahan dari salah satu faktor tersebut bisa mengakibatkan terjadinya perubahan dalam perhitungan profitabilitas.

c. Teori Keynes

Masalah investasi, baik penentuan jumlah maupun kesempatan berinvestasi oleh *Keynes* didasarkan atas konsep Marginal Efficiency of Investment (MEI) yang lebih tinggi dari pada tingkat bunga. Investasi ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar tingkat suku bunga. Menurut pendapat *Keynes* secara umum jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha lebih kecil dibandingkan dengan jumlah tabungan atau investasi yang dilakukan oleh rumah tangga pada waktu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*), oleh karena itu permintaan tenaga kerja agregat dalam perekonomian akan meningkat. Kekurangan dalam agregat ini akan mengakibatkan pengurangan penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian (*Dernburg*, 1994).

Keynes juga mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi akan ditentukan oleh pengeluaran seluruh masyarakat, bukan ditentukan oleh kesanggupan alat-alat modal untuk memproduksi barang. Investasi yang dilakukan dalam teori klasik bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memproduksi sehingga akumulasi modal yang terbentuk pada akhirnya juga dapat meningkatkan investasi, sedangkan investasi dalam teori *Keynes*, besar investasi yang dilakukan tidak bergantung pada tinggi rendahnya suatu tingkat bunga, melainkan tergantung pada besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Semakin besar pendapatan yang diperoleh rumah tangga, maka investasi yang dilakukan juga akan semakin besar (*Dernburg*, 1994).

2.1.7 Kemiskinan

a. Konsep Kemiskinan

Chambers dalam *Chriswardani Suryawati* (2005) menyatakan bahwa dalam arti luas, kemiskinan adalah suatu konsep terintegrasi yang terdiri lima dimensi, yaitu kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan dalam menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara sosiologis maupun geografis.

Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup hal-hal sebagai berikut ini:

- 1) Gambaran kekurangan materi yang mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai keadaan dimana terjadi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- 2) Gambaran kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan dalam berpartisipasi di masyarakat. Hal ini meliputi pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan berdasarkan kemiskinan, karena mencakup masalah-masalah politik dan moral serta tidak adanya batasan pada bidang ekonomi.
- 3) Gambaran penghasilan dan kekayaan yang kurang memadai dengan melakukan perbandingan terhadap tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan.

Kemiskinan menurut UNDP dalam Cahyat, dkk (2007), merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan kondisi lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan. Kemiskinan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

a) Kemiskinan absolut

Kemiskinan yang berkaitan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak sehingga kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal supaya dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Kemiskinan absolut menurut Bank Dunia didefinisikan sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari.

b) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat disekitarnya atau dilingkungannya. Semakin besar ketimpangan kehidupan antara masyarakat golongan atas dan golongan bawah, maka akan menyebabkan semakin besar juga jumlah penduduk yang dapat dikategorikan kedalam penduduk miskin, sehingga kemiskinan relatif berhubungan erat dengan masalah distribusi pendapatan. Variasi kemiskinan yang terjadi di negara berkembang diakibatkan karena adanya beberapa faktor, yaitu luasnya suatu negara, perbedaan sejarah, sebagian wilayah yang dijajah oleh negara yang berlainan, perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, sektor publik dan swasta yang relatif penting serta perbedaan struktur industri (Todaro, 1995).

b. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dapat dilihat pada teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Rukse (1953) dalam Yudha (2013). Teori ini menjelaskan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal akan mengakibatkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah akan mengakibatkan pendapatan yang diterima juga akan rendah. Pendapatan yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Investasi yang rendah akan berdampak pada keterbelakangan dan seterusnya.

c. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Menurut penyebab kemiskinan menurut Kuncoro dalam Adi (2011) yaitu sebagai berikut:

- 1) Secara makro, kemiskinan terjadi karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya pun juga rendah,

- 2) Kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah memiliki arti bahwa produktivitas juga rendah, upah yang diperoleh pun juga rendah
- 3) Kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan akses dan modal.

2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM digunakan sebagai indikator keberhasilan serta gambaran komprehensif atas pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Tolok ukur IPM yang digunakan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan. IPM dikenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh *united nations development programme* (UNDP). Perkembangan nilai IPM membuktikan bahwa terdapat indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah. Terdapat tiga dimensi dasar dalam pembangunan manusia yaitu umur panjang dan sehat serta pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan diukur menggunakan angka umur harapan hidup, pengetahuan diukur menggunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) (Badan Pusat Statistik, 2008).

$$IPM = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$$

Dimana :

X_1 = Indeks harapan hidup,

X_2 = Indeks pendidikan,

X_3 = Indeks standart hidup layak.

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah dengan menggunakan angka kelahiran

dan kematian pertahun. Hal ini diharapkan dapat mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus tingkat kesehatan masyarakat. Perhitungan indeks pendidikan menggunakan dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf merupakan kemampuan dalam membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan jumlah orang yang sekolah dikalikan dengan lama sekolah, kemudian dijumlahkan dan dibagi 20 (total lama sekolah). Setelah memperoleh nilai melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dilakukan penyesuaian agar memiliki nilai pada skala 0 dan 1. Nilai kedua indikator tersebut kemudian dihitung sesuai dengan ketentuan UNDP dan dijadikan indeks pendidikan dengan perbandingan bobot angka melek huruf 2 dan rata-rata lama sekolah 1.

$$IP = \frac{2}{3} \cdot \text{Indeks Lit} + \frac{1}{3} \cdot \text{Indeks MYS}$$

Dimana :

IP = Indeks pendidikan,

Lit = Angka melek huruf,

MYS = Rata-rata lama sekolah.

Standar hidup layak diukur menggunakan *gross domestic product* (GDP) perkapita. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan PDRB perkapita, maka yang diukur hanyalah produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat. Pengukuran daya beli masyarakat antar provinsi atau kabupaten/kota menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berupa rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar sebanding dengan daerah lain. Penyesuaian dengan indeks pengeluaran riil perkapita (PPP) berdasarkan ketentuan UNDP menurut Franciari (2012) adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita pertahun untuk 27 komoditi dari Susenas Kor yang telah disesuaikan (=A),

- b. Menghitung nilai pengeluaran riil (=B) dengan membagi rata-rata pengeluaran (A) dengan indeks harga konsumen (IHK) pada tahun yang bersangkutan,
- c. Metode penghitungan disesuaikan dengan menstandarkan *gross national product* (GNP) perkapita agar sebanding dengan indeks kemahalan wilayah yang disebut dengan daya beli per unit (=PPP/unit). Data yang digunakan adalah data kuantum perkapita pertahun dari suatu komoditi yang terdiri dari 27 komoditi tersebut. Perhitungan PPP dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$PPP/unit = Ri = \frac{\sum_{j=1}^{27} E_{ij}}{\sum_{j=1}^{27} P_{ij} Q_{ij}}$$

Dimana :

E_{ij} = pengeluaran untuk komoditi j di kabupaten/kota,

P_{ij} = harga komoditi j kabupaten/kota i,

Q_{ij} = jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di kabupaten/kota i.

Tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada IPM sangat bergantung pada komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Pemerintah memiliki peran sangat penting dalam penyusunan kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Anand, 1993) dalam Badrudin dan Khasanah (2011).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Setelah penjabaran teori terkait penelitian, secara ringkas dapat disajikan ringkasan penelitian-penelitian sejenis yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

Mirza (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009, bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan IPM di Jawa Tengah pada tahun 2006-2009 dan menganalisis seberapa besar pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap IPM di Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah ini antara lain adalah *pooled least square model (common effect)*, model pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan model pendekatan efek acak (*random effect*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode tahun 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan hasil regresi panel menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Sumiyati (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan dari belanja modal tahun 2006 dan 2007 terhadap peningkatan IPM 2008 di Propinsi Jawa Barat. Alat analisis yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah ini adalah regresi linier dengan menggunakan data silang (*cross section*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tahun 2006 dan 2007 baik secara parsial maupun simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM tahun 2008, namun demikian apabila dilihat dari bentuk hubungannya masih menunjukkan arah positif yang dapat diartikan setiap peningkatan belanja modal menyebabkan adanya peningkatan IPM. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa dalam struktur alokasi APBD belum sepenuhnya menggambarkan pembangunan

kualitas manusia yang menjadi arah dan kebijakan pembangunan. Hal ini secara langsung berkaitan dengan ketersediaan dan keterpakaian fasilitas pendukung perbaikan IPM yang masih dirasa kurang, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM selain komponen pendidikan dan kesehatan.

Setyowati dan Suparwati (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel *Intervening* (studi kasus Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linear. Berdasarkan hasil penelitian, hanya pertumbuhan ekonomi yang tidak memiliki pengaruh positif terhadap IPM, sedangkan variabel lain meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM).

Lugastoro (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi PAD, realisasi dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil) dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM kabupaten/kota di Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan pendekatan *random effect model* (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Sementara itu, rasio Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal menjadi satu-satunya variabel yang tidak signifikan dalam mempengaruhi IPM. Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan terhadap IPM.

Vegirawati (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Alokasi Belanja Langsung terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Studi Kasus pada

Pemerintah Kabupaten/kota di Sumatera Selatan menggunakan teknik analisis statistik inferensial dengan menggunakan regresi sederhana (*simple regression*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja langsung tidak dapat memprediksi IPM, dengan demikian pemerintah daerah hendaknya memilih program kegiatan lain yang dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut.

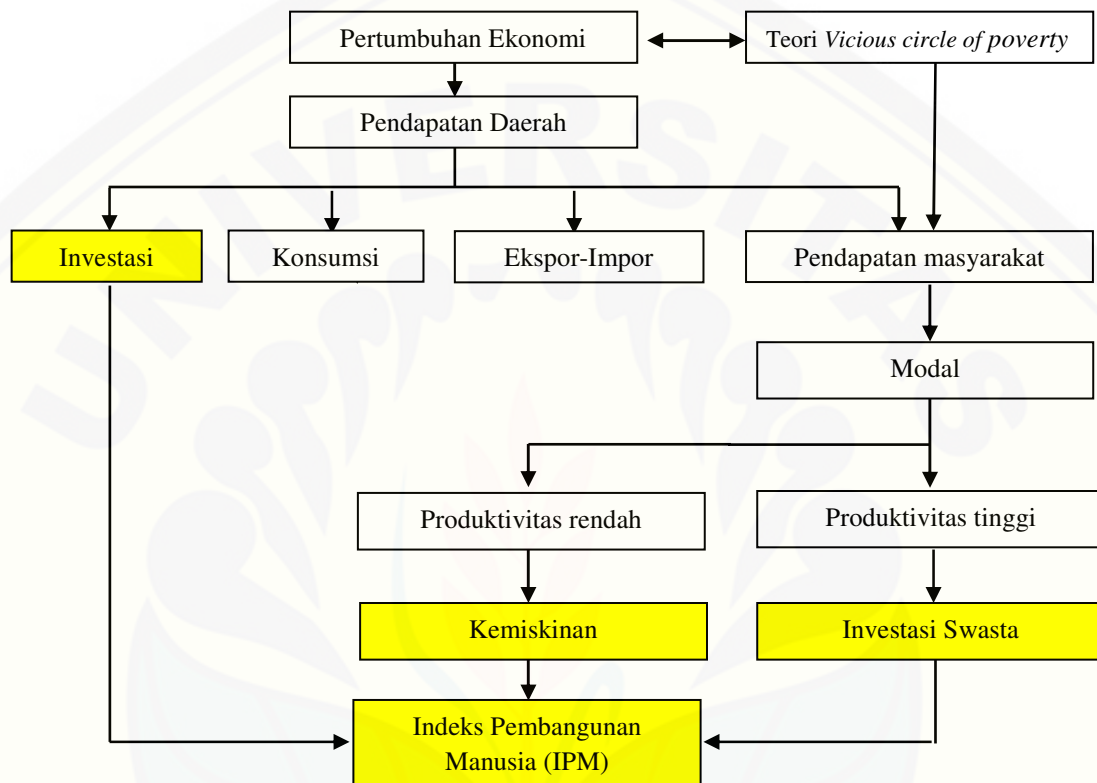


Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Judul	Alat analisis	Hasil
1.	Mirza (2012), Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.	<i>Pooled least square model (common effect)</i> , model pendekatan efek tetap (<i>fixed effect</i>), model pendekatan efek acak (<i>random effect</i>).	Menunjukkan perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode tahun 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2.	Sumiyati (2011), Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.	Regresi linier dengan menggunakan data Silang (<i>cross section</i>)	Bahwa belanja modal tahun 2006 dan 2007 baik secara parsial maupun simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2008.
3.	Setyowati dan Suparwati (2012), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (studi kasus Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah)	Regresi Linear	Pertumbuhan ekonomi yang tidak memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Variabel lain meliputi DAU, DAK, PAD memiliki pengaruh positif terhadap IPM melalui PABM. Pengalokasian ini diprosikan dengan belanja modal terbukti berpengaruh positif terhadap IPM.
4.	Lugastoro (2013), Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur.	Analisis data panel dengan pendekatan <i>Random Effect Model</i> (REM)	Bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu rasio DBH terhadap belanja modal menjadi satu-satunya variabel yang tidak signifikan dalam mempengaruhi IPM. Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan terhadap IPM
5.	Vegirawati (2012), Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/kota di Sumatera Selatan.	Teknik analisis statistik inferensial dengan menggunakan regresi sederhana (<i>simple regression</i>)	Bahwa belanja langsung tidak dapat memprediksi IPM, dengan demikian, pemerintah daerah hendaknya memilih program kegiatan lain yang dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut.

2.3 Kerangka Konseptual

Dari penjelasan latar belakang dan tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang diuraikan, maka hipotesis dari tujuan penelitian yaitu :

1. Kapasitas investasi domestik dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di Jawa Timur.
2. Investasi publik dan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory* atau penelitian yang menjelaskan mengenai hubungan kausal antara variabel penelitian dengan pengujian hipotesa (Singarimbun dan Effendi, 1995). Menurut Hendarmin (2012) penelitian *explanatory* adalah penelitian untuk menguji dan menjelaskan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen (sebab-akibat).

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Jawa Timur dengan kapasitas investasi domestik dan kemiskinan yang digunakan sebagai indikator untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di Jawa Timur.

3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jawa Timur pada tahun 2015 dengan mengambil data tahun 2010-2013 dikarenakan provinsi ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi memiliki nilai IPM yang masih relatif rendah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang

dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2013, sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder *cross section* untuk menguji pengaruh kapasitas investasi domestik dan kemiskinan terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di Jawa Timur serta menggunakan data *time series* untuk menguji pengaruh investasi publik dan investasi swasta terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Bank Indonesia wilayah Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Timur. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data IPM di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur yang diperoleh dari BPS Jawa Timur;
- b. Data jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur yang diperoleh dari BPS Jawa Timur;
- c. Data Investasi swasta di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur yang diperoleh dari Bank Indonesia wilayah Jawa Timur;
- d. Data Penanaman Modal Dalam Negeri di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal Jawa Timur.
- e. Data Investasi Publik di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yaitu berupa analisis regresi linear yang menggambarkan sebuah hubungan kausalitas. Adapun data yang digunakan adalah data silang (*cross section*) untuk menguji pengaruh kapasitas investasi domestik dan kemiskinan terhadap peningkatan

indikator pembangunan manusia sedangkan untuk menguji pengaruh investasi publik dan investasi swasta terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia data yang digunakan adalah data *time series*.

Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Model regresi linear pengaruh kapasitas investasi domestik dan kemiskinan terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di Jawa Timur

$$\text{LogIPM} = f(\text{LogIS}, \text{LogPMDN}, \text{LogPOV}) \dots \dots \dots (1)$$

Dari model ekonomi diatas (1) kemudian ditrasformasikan ke model ekonometrika sebagai berikut :

$$\text{LogIPM} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPMDN} + \beta_2 \text{LogIS} + \beta_3 \text{LogPOV} + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- LogIPM = Indeks Pembangunan Manusia
- LogIS = Investasi Swasta
- LogPMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri
- LogPOV = Jumlah Penduduk Miskin
- β_0 = konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi
- e = error

- b. Model regresi linear pengaruh investasi publik dan investasi swasta terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur

$$\text{LogIPM} = f(\text{LogIP}, \text{LogIS}) \dots \dots \dots (3)$$

kemudian di transformasikan ke model ekonometrika sebagai berikut:

$$\text{LogIPM} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogIP} + \beta_2 \text{LogIS} \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan :

- LogIPM = Indeks Pembangunan Manusia
- LogIP = Investasi Publik
- LogIS = Investasi Swasta

3.3.2 Uji Statistik

Dari persamaan regresi linear berganda, selanjutnya dilakukan pengujian statistik, antara lain : a) Uji F (uji pengaruh secara simultan); b) uji t (uji pengaruh secara parsial); c) uji R^2 (koefisien determinan).

a. Uji F-statistik

Pengaruh semua variabel independen yang ada dalam model dapat diuji menggunakan simultan (uji F). Uji statistik F akan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh atau tidak secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{\text{statistik}} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Hipotesis :

Ho : $\beta_1 = \beta_2 = 0$ artinya, secara bersama sama variabel independen investasi swasta, PMDN dan jumlah penduduk miskin, tidak berpengaruh terhadap variabel dependen IPM.

Ha : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ artinya, secara bersama sama variabel independen independen investasi swasta, PMDN dan jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap variabel dependen IPM.

Kriteria pengujian :

1. Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika nilai F-statistik > F-tabel atau nilai probabilitas F statistik < nilai probabilitas α maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, secara bersama sama variabel independen independen investasi swasta, PMDN dan jumlah penduduk miskin mempengaruhi variabel dependen IPM.
2. Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika nilai F-statistik < F-tabel atau nilai probabilitas F statistik > nilai probabilitas α maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya, secara bersama sama variabel independen independen investasi swasta, PMDN dan jumlah penduduk miskin tidak mempengaruhi variabel dependen IPM.

b. Uji t-statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, diuji dengan rumus :

$$t_{\text{statistik}} = \frac{b_i - \beta_i}{S_{b_i}}$$

Hipotesis :

Ho : $\beta_1 = \beta_2 = 0$ artinya, secara parsial variabel independen investasi swasta, PMDN dan jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap variabel dependen IPM.

Ha : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ artinya, secara parsial variabel independen investasi swasta, PMDN dan jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap IPM.

Kriteria pengujian :

1. Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika nilai t-statistik > t-tabel atau nilai probabilitas t statistik < nilai probabilitas α maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, secara parsial variabel independen investasi swasta, PMDN dan jumlah penduduk miskin mempengaruhi variabel dependen IPM;
2. Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika nilai t-statistik < t-tabel atau nilai probabilitas t statistik > nilai probabilitas α maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya, secara parsial variabel independen investasi swasta, PMDN dan jumlah penduduk miskin tidak mempengaruhi variabel dependen IPM.

c. Uji R² (Koefisien Determinan)

Koefisien determinan (R^2) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dengan menghitung koefisien R^2 . Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

3.3.3 Uji Asumsi Klasik

Hasil analisis regresi linear berganda yang signifikan sudah dapat menentukan bahwa model regresi yang diperoleh telah dapat menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Untuk memperjelas dan memperkuat pengaruh dari hasil analisis regresi yang diperoleh maka digunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut disebut sebagai uji diagnosis, uji asumsi klasik perlu dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-berra test* (JB Tes). Pedoman dari JB test adalah:

1. Bila nilai JB hitung $>$ nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas JB hitung $<$ nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, *error term* adalah berdistribusi normal ditolak;
2. Bila nilai JB hitung $<$ nilai X^2 tabel nilai probabilitas JB hitung $>$ nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* adalah terdistribusi normal (Wardhono, 2004).

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah uji untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi tertanggu. Jika multikolinieritas itu sempurna maka setiap koefisien regresi dari variabel-variabel bebas tidak dapat menentukan standar eror batasnya. Cara umum untuk mendeteksi adanya multikolinieritas yaitu dengan melihat bahwa R^2 yang tinggi akan tetapi t statiknya kecil bahkan cenderung tidak signifikan. Dalam penelitian ini menggunakan nilai matrik korelasi untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Apabila nilai matrik

korelasi melebihi 80% maka variabel-variabel bebasnya memiliki hubungan yang tinggi dan cenderung terkena multikolinieritas (Gujarati, 1999).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah bilamana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas saat dilakukan dengan metode *scatter plot* dengan memplotkan ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik di dapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya. Uji statistik yang dapat digunakan adalah Uji Park atau uji White, uji Gletser. Heteroskedastisitas cenderung terjadi pada model yang menggunakan data *cross section* dari pada data *time series*. Hal ini terjadi karena data time series berfluktuasi dari waktu ke waktu dengan stabil.

d. Uji Autokorelasi

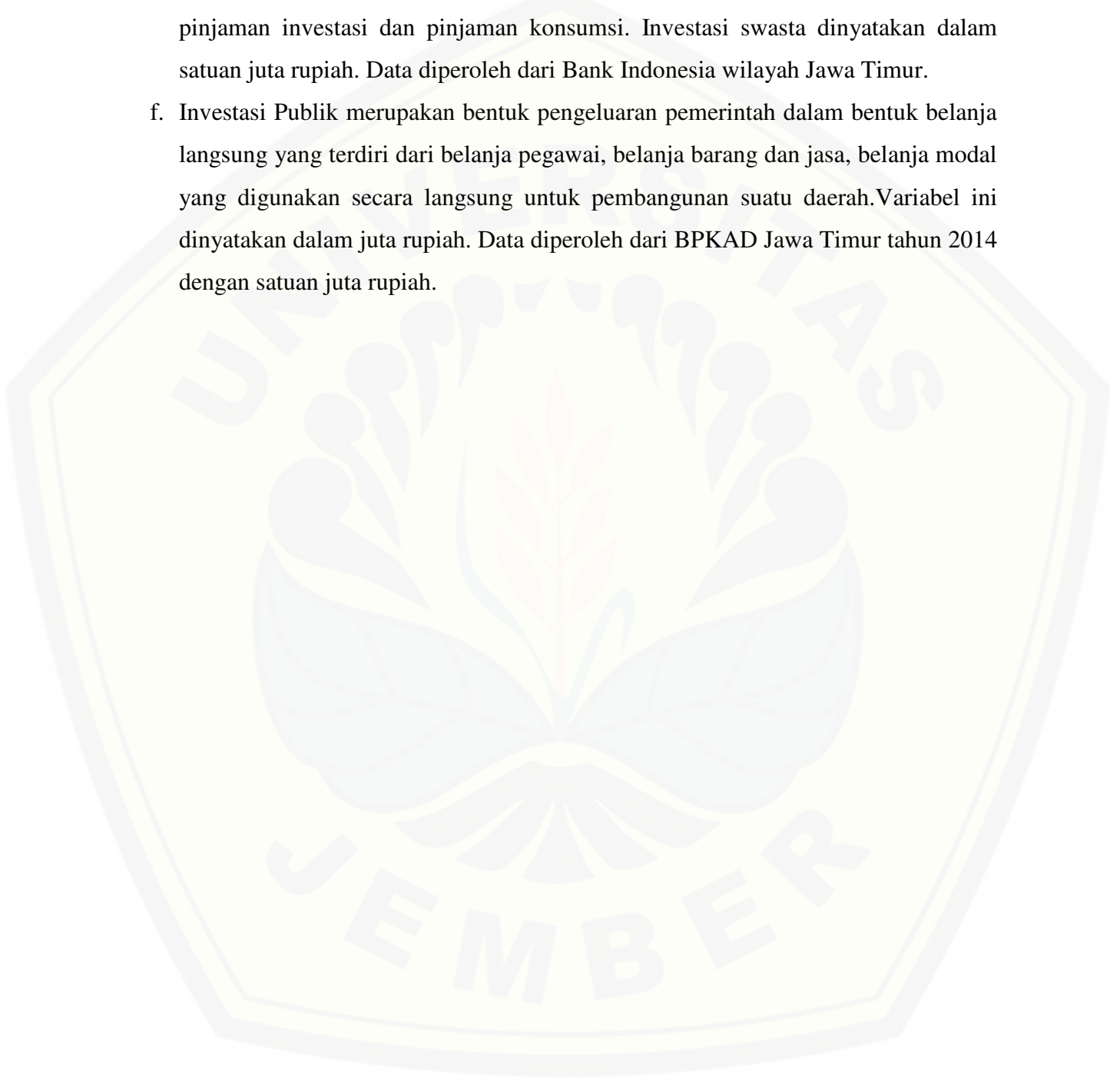
Uji Autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode sebelumnya ($t-1$). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi biasanya hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan jarang dilakukan pada data cross section. Beberapa uji statistik yang sering digunakan adalah uji Durbin-Watson, uji dengan run tes dan uji Breusch-Godfrey (Uji Lagrange Multiplier). Beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum (*generalized difference equation*).

3.4 Definisi Variabel Operasional

Variabel operasional merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini agar terhindar dari terjadinya pemahaman yang tidak sesuai dengan masalah yang dibahas maka definisi variabel operasional dan pengukurannya adalah :

- a. Indikator Pembangunan Manusia diukur dari nilai IPM. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yaitu mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, dimana menjadi sasaran atas kebijakan keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Nilai IPM diukur dalam satuan poin angka yaitu antara 0,00 – 100,00.
- b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah investasi yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha swasta domestik dan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah baik terhadap perusahaan atau BUMN, penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan swasta maupun atas nama lembaga pemerintah (Dernburg, 1994). PMDN dinyatakan dalam juta rupiah dan data diperoleh dari Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
- c. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta (bukan pemerintah) di negara selain negara asal pemilik modal serta penanaman modal asing pemerintah/nasional yang merupakan penanaman modal dari suatu negara ke negara lain. PMA dinyatakan dalam juta dolar USA. Data diperoleh dari Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
- d. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin dinyatakan dalam ribu jiwa. Data diperoleh dari BPS Jawa Timur.

- e. Invesatasi Swasta adalah Invesatasi yang dikeluarkan oleh swasta berupa pinjaman yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja, pinjaman investasi dan pinjaman konsumsi. Investasi swasta dinyatakan dalam satuan juta rupiah. Data diperoleh dari Bank Indonesia wilayah Jawa Timur.
- f. Investasi Publik merupakan bentuk pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang digunakan secara langsung untuk pembangunan suatu daerah. Variabel ini dinyatakan dalam juta rupiah. Data diperoleh dari BPKAD Jawa Timur tahun 2014 dengan satuan juta rupiah.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Keadaan Geografis Wilayah di Jawa Timur

Jawa Timur merupakan provinsi yang terletak di bagian ujung paling timur Pulau Jawa. Wilayah Jawa Timur terletak antara $111^{\circ}0'$ - $114^{\circ}4'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}12'$ - $8^{\circ}48'$ Lintang Selatan. Jawa Timur memiliki luas wilayah sebesar 47.963 km^2 dan terbagi dalam dua wilayah, yaitu Jawa Timur daratan dan kepulauan Madura. Wilayah Jawa Timur sebesar $99,70 \%$ atau 42.541 km^2 , sementara luas kepulauan Madura $11,30\%$ atau sebesar 5.422 km^2 .

Ibu kota Jawa Timur terletak di Surabaya. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Secara administrasi pemerintahan Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, 658 kecamatan, 8.457 desa/kelurahan (6.097 desa dan 2.400 kelurahan). Jumlah tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.

Jawa Timur memiliki garis pantai yang sangat panjang. Hal tersebut dikarenakan tiga sisi wilayahnya berbatasan langsung dengan perairan laut. Jawa Timur berbatasan langsung dengan laut Jawa di sebelah utara, selat Bali di sebelah timur, perairan terbuka samudera Indonesia disebelah selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

4.1.2. Keadaan Demografis Wilayah di Jawa Timur

Penduduk pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan, sedangkan penduduk yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya.

Data jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2013 berdasarkan hasil proyeksi BPS yaitu sebesar 38.363.195 jiwa. Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 2.821.929 jiwa, diikuti dengan Kabupaten Malang sebanyak 2.508.698 jiwa dan Kabupaten Jember sebanyak 2.381.400 Jiwa. Kepadatan penduduk Jawa Timur pada tahun 2013 yaitu sebesar 795 jiwa/km². Kepadatan penduduk di wilayah kota pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di wilayah kabupaten. Kota Surabaya memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Timur yaitu sebesar 8.551 jiwa/km². Data dapat dilihat pada table 4.1.

Tabel 4.1. Jumlah, Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk di Jawa Timur Tahun 2010 – 2013

Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
2010	37.565.706	-	783
2011	37.840.657	0,73	789
2012	38.106.590	0,70	791
2013	38.363.195	0,67	795

Keterangan : Data penduduk pertengahan tahun (data diolah).

Sumber : BPS Jawa Timur, 2014.

Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah yaitu 0,07%. Kota Surabaya sebagai sentra kegiatan ekonomi Jawa Timur memiliki faktor menarik sebagai daerah tujuan bagi para pencari kerja sehingga pertumbuhan penduduknya semakin lama semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan para pendatang umumnya berdomisili di wilayah kabupaten/kota sekitar Kota Surabaya. Penduduk Jawa Timur mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian (46,18%), selebihnya bekerja di sektor perdagangan (18,80%), sektor jasa (12,78%) dan sektor industri (12,51%).

Jawa Timur memiliki Penduduk yang beretnis relatif heterogen, mayoritas penduduknya adalah suku Jawa. Selain suku Jawa terdapat suku Madura, Tengger,

Osing, dan Bali. Suku Madura mendiami pulau Madura dan daerah bagian timur pulau Jawa, terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Suku Madura di wilayah timur pulau Jawa mayoritas adalah Pendalungan, yaitu perpaduan antara suku Jawa dan Madura. Suku Madura tersebar hampir diseluruh wilayah Jawa Timur dan pada umumnya bekerja di sektor informal. Suku Tengger tersebar di daerah pegunungan tengger dan sekitarnya. Suku Osing mendiami sebagian wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Suku Bali juga mendiami sejumlah desa di Kabupaten Banyuwangi. Sebagian kecil daerah pedalaman di Kabupaten Bojonegoro didiami oleh orang Samin. Penduduk keturunan Tionghoa dan Arab juga tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur. Warga ekspatriat sebagian besar tinggal di Kota Surabaya dan sejumlah kawasan industri lainnya. Penduduk Jawa Timur menganut berbagai agama yang berbeda. Mayoritas penduduknya beragama Islam (95,76%). Penduduk Jawa Timur yang menganut agama Kristen Protestan sebesar 1,98%, Katolik sebesar 0,98%, hindu sebesar 0,94%, Budha sebesar 0,29% dan kepercayaan lainnya 0,05%.

4.1.3. Kondisi Makro Ekonomi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan pembangunan di suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menunjukkan tingkat perubahan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berdasarkan pendapatan salah satunya dapat dilihat menggunakan indikator berupa data PDRB atas harga konstan pada tahun 2000. PDRB atas harga konstan menggunakan harga tetap dari tahun ke tahun, sehingga perubahan harga tidak berpengaruh terhadap perhitungan sehingga lebih menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya dibandingkan dengan PDRB atas harga berlaku (Sartika, 2011).

Secara umum pertumbuhan ekonomi makro Jawa Timur dipengaruhi oleh tiga sektor utama yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan

serta sektor pertanian. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang paling berkontribusi terhadap nilai PDRB Jawa Timur pada tahun 2013 yaitu sebesar 29,47%. Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 27,49% terhadap nilai PDRB Jawa Timur pada tahun 2013, sedangkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan hanya berkontribusi sebesar 15,75%.

Tabel 4.2. Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2011-2013

Sektor	Pertumbuhan PDRB (%)		
	2011	2012	2013
1. Pertanian	2,53	3,49	1,59
2. Pertambangan dan Penggalian	6,08	2,10	3,53
3. Industri Pengolahan	6,06	6,34	5,59
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	6,25	6,21	4,74
5. Konstruksi	9,12	7,05	9,08
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,81	10,06	8,61
7. Pengangkutan dan Komunikasi	11,44	9,65	10,43
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush.	8,18	8,01	7,72
9. Jasa-jasa	5,08	5,07	5,31
Total	7,22	7,27	6,55

Sumber : BPS Jawa Timur, 2014.

Perkembangan perekonomian Jawa Timur cenderung berfluktuatif pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2011 yaitu sebesar 7,22%, kemudian meningkat menjadi 7,27% pada tahun 2012 dan mengalami penurunan menjadi 6,55% pada tahun 2013. Hampir seluruh sektor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi makro pada tahun 2013 mengalami penurunan, kecuali sektor konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa. Tiga sektor utama yang secara umum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi makro yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan serta sektor pertanian juga tergolong berfluktuatif pada tahun 2011 hingga tahun 2013.

Sektor pertanian dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 3,49% dan mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013 menjadi 1,9%. Sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 6,06% menjadi 6,34 pada tahun 2012, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 5,59%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan dari 9,81% pada tahun 2011 menjadi 10,06% pada tahun 2012 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 8,61%.

PDRB Jawa Timur pada tahun 2013 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sebesar 6,55%. Angka persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 yaitu sebesar 7,27% atau melebihi pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 6,78%. Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2013 cukup baik, karena pertumbuhannya dapat melampaui pertumbuhan perekonomian provinsi lain di Pulau Jawa, diantaranya DKI Jakarta yaitu sebesar 6,11%, Jawa Barat sebesar 6,06% dan Jawa Tengah sebesar 5,81% (BPS Jawa Timur; BPS Pusat).

Besaran PDRB Jawa Timur pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku yaitu sebesar Rp 1.136,33 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan besaran PDRB mencapai Rp 419,43 triliun. PDRB Jawa Timur pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 14,87% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp 9,184 triliun. Jumlah penduduk Jawa Timur pada pertengahan tahun 2013 menurut proyeksi BPS yaitu sebesar 38.363,2 ribu jiwa, sehingga didapatkan PDRB perkapita Jawa Timur atas dasar harga berlaku mencapai Rp 29,62 juta atau meningkat sebesar 12,74% dibandingkan dengan tahun 2012. Masyarakat dianggap mengalami pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakat apabila pendapatan perkapita baik menurut harga maupun pendapatan terus meningkat.

4.1.4. Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur

Kesejahteraan masyarakat menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012) dapat dinilai dari tiga aspek yaitu IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

serta jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan. IPM Jawa Timur pada tahun 2013 merupakan yang terbesar dibandingkan dengan IPM pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. IPM Jawa Timur pada tahun 2009 yaitu sebesar 71,06, pada tahun 2010 meningkat menjadi 71,62, meningkat kembali menjadi 72,12 pada tahun 2011, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2012 menjadi 72,83 dan pada akhirnya naik hingga mencapai 73,54 pada tahun 2013 (dapat dilihat pada table 4.2). IPM Jawa Timur terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013, tetapi posisi IPM pada tahun 2013 tersebut termasuk rendah dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia dan di Pulau Jawa khususnya (BPS Jawa Timur; BPS Pusat).

Tabel 4.3. Pertumbuhan IPM di Jawa Timur Tahun 2004-2013

Tahun	IPM	Perubahan (%)
2004	66.85	-
2005	68.42	2.35%
2006	69.18	1.11%
2007	69.78	0.87%
2008	70.38	0.87%
2009	71.06	0.96%
2010	71.62	0.78%
2011	72.18	0.78%
2012	72.83	0.91%
2013	73.54	0.97%
Rata-rata	70.58	

Sumber: BPS Jawa Timur, diolah

IPM Jawa Timur pada tahun 2013 menduduki urutan ke-18 di Indonesia. IPM Jawa Timur pada tahun 2013 bahkan lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi di Pulau Sumatera seperti Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Jambi. IPM Jawa Timur pada tahun 2013 juga lebih rendah dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Sulawesi seperti Sulawesi

Utara serta beberapa provinsi di Pulau Kalimantan seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara (BPS Pusat).

IPM Jawa Timur termasuk rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. IPM Jawa Timur berada pada peringkat ke-5 dari total 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Urutan provinsi di pulau Jawa dengan IPM tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut: (1) DKI Jakarta dengan IPM sebesar 78,59; (2) DI Yogyakarta sebesar 77,37; (3) Jawa Tengah sebesar 74,05; (4) Jawa Barat sebesar 73,58; (5) Jawa Timur sebesar 73,54; dan Banten dengan IPM sebesar 71,90 (BPS Jawa Timur; BPS Pusat).

Kota Surabaya memiliki IPM tertinggi pada tahun 2013 di Jawa Timur yaitu sebesar 78,97, kemudian diikuti oleh Kota Malang yaitu sebesar 78,78 dan Kota Blitar yaitu sebesar 78,70. Daerah di wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura relatif memiliki IPM yang rendah pada tahun 2013. IPM terendah terdapat pada Kabupaten Sampang yaitu sebesar 62,39 (BPS Jawa Timur).

Menurut BPS Jawa Timur berdasarkan hasil Sakernas 2011-2013, dari total keseluruhan jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2013 sebanyak 38.363.195 jiwa, jumlah angkatan kerja yang tersedia yaitu sebanyak 20.137.795 jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja dari total keseluruhan jumlah angkatan kerja yang ada yaitu sebanyak 19.266.457 jiwa (95,77%), sedangkan pencari kerja yang tidak/belum mendapatkan lapangan pekerjaan yaitu sebanyak 871.338 jiwa. Para pencari kerja yang tidak/belum mendapatkan lapangan pekerjaan termasuk ke dalam golongan pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja yang bekerja masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah total keseluruhan angkatan kerja yang tersedia. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2013 bertambah 184.462 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2012, tetapi jumlah pengangguran pada tahun 2013 justru bertambah sebanyak 51.775 dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada tahun 2012.

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang tersedia. TPT Jawa Timur berdasarkan hasil Sakernas 2011-2013 mengalami peningkatan dari 4,12% pada tahun 2012 menjadi 4,33% pada tahun 2013. Jumlah tersebut dinilai masih cukup tinggi, oleh karena itu sangat diperlukan upaya untuk menekan dan menurunkan jumlah pengangguran di Jawa Timur (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012; BPS Jawa Timur).

Selain dinilai dari aspek IPM dan TPT, kesejahteraan masyarakat menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012) juga dapat dinilai dari aspek jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan. Perkembangan Jawa Timur dalam menurunkan jumlah penduduk miskinnya bisa dikatakan cukup baik. Jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada tahun 2013 menurun menjadi 4.865.820 jiwa atau sebesar 12,73% dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Jawa Timur yang mencapai 4.960.500 jiwa atau sebesar 13,08% pada tahun 2012. Berdasarkan persentase jumlah tersebut, jumlah penduduk miskin Jawa Timur dari tahun 2012 hingga tahun 2013 menurun sebanyak 0,33%. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Hasbullah, penurunan jumlah penduduk miskin ini dipicu oleh upaya peningkatan kesejahteraan penduduk yang menjadi target utama Jawa Timur serta berbagai strategi yang dilakukan guna mencapai target tersebut.

Berdasarkan hasil Susenas 2013, garis kemiskinan Jawa Timur meningkat 6,31% atau 16.248 rupiah/kapita, yaitu dari 257.510 rupiah/kapita menjadi 273.759 rupiah/kapita. Kenaikan garis kemiskinan di pedesaan mencapai 7,49% atau lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yang hanya mencapai 5,07%. Garis kemiskinan makanan berkontribusi sebanyak 73,67% terhadap garis kemiskinan pada tahun 2013. Terdapat lima komoditas makanan yang secara persentase berkontribusi cukup besar terhadap garis kemiskinan makanan baik pada wilayah pedesaan maupun perkotaan, komoditas tersebut terdiri dari beras, rokok filter, gula pasir, tempe dan tahu.

Nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) Jawa Timur pada september 2013 menunjukkan peningkatan menjadi 2,07% dibandingkan pada september 2012. Peningkatan nilai P1 tersebut terjadi di perkotaan sebesar 0,11 poin dan 0,4 poin di

pedesaan. Nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan menjadi 0,07 poin atau menjadi 0,50% pada september 2013. Peningkatan P1 dan P2 dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan serta semakin melebarnya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin (BPS Jawa Timur; Sartika, 2011).

4.1.5 Usaha Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Perkembangan pemerintahan dapat dilihat melalui adanya pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri yang disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi ini bertujuan mengembangkan perencanaan serta pelaksanaan pelayanan publik, meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, dan meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Desentralisasi atau pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh terhadap eksistensi pemerintah daerah untuk lebih cermat lagi dalam mengamati kondisi dan keadaan daerah supaya dapat dikembangkan dan membentuk konsep perencanaan pembangunan daerah. Kompleksnya permasalahan pembangunan daerah dan keterbatasan sumber daya tersedia menjadi tantangan utama dari pembangunan daerah. Kondisi yang demikian menuntut adanya suatu sistem perencanaan pembangunan yang cermat, tepat dan strategi pengembangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud disini adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat, kesempatan kerja dan meratanya pembagian pendapatan. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meratakan pembangunan di daerah tersebut secara efektif dan efisien. Hal tersebut diharapkan dapat mengakibatkan tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan ekonomi yang

merata di seluruh pelosok Indonesia (Suparmoko, 2012). Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan PDRB (Setyaningrum dkk., 2013).

PDRB dapat menunjukkan kontribusi setiap sektor pertumbuhan ekonomi, mulai dari yang memiliki kontribusi tertinggi hingga sektor yang memiliki kontribusi terendah. PDRB dapat naik ataupun turun setiap tahunnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila PDRB selalu diusahakan untuk selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Setyaningrum dkk., 2013).

Jawa Timur memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang. PDRB Jawa Timur pada tahun 2013 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sebesar 6,55%. Angka persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 yaitu sebesar 7,27% atau melebihi pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 6,78%. Perekonomian Jawa Timur pada tahun juga 2013 cukup baik, karena pertumbuhannya dapat melampaui pertumbuhan perekonomian provinsi lain di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebesar 5,81% (BPS Jawa Timur; BPS Pusat). Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur sebenarnya dapat memperoleh PDRB yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya apabila mampu memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki secara maksimal (Setyaningrum dkk., 2013).

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan diatas, guna meningkatkan perekonomian yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Jawa Timur perlu mengetahui sektor pertumbuhan ekonomi potensial yang dapat digali dan dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan PDRB. Hal-hal yang dapat dilakukan dan dikembangkan pemerintah dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur diantaranya adalah dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kecepatan perubahan yang lebih dinamis, berkesinambungan, berdaya saing dengan didukung kemandirian lokal untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kondisi tersebut berbasis pada perekonomian yang bertumpu kepada daya dukung sumber daya lokal dan mengoptimalkan penataan pembangunan daerah di segala bidang. Analisis sektor ekonomi potensial dibutuhkan untuk memposisikan

sektor tersebut sebagai sektor unggulan sekaligus menjadi potensi daerah yang berdaya saing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Setyaningrum dkk., 2013).

Menurut Suparmoko (2002), potensi yang ada di daerah bisa dikembangkan menggunakan lima strategi. Strategi yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang berpotensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada masing-masing sektor. Kedua, mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut. Ketiga, mengidentifikasi sumber daya (faktor produksi) yang ada termasuk sumberdaya manusia yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan pada setiap sektor yang bersangkutan. Keempat, dengan menggunakan model pembobotan terhadap variabel-variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan sub-sektor, sehingga akan ditemukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya bisa dianggap sebagai sektor ekonomi potensial yang patut dan layak untuk dikembangkan di daerah yang bersangkutan. Kelima, menentukan strategi yang akan ditempuh untuk mengembangkan sektor-sektor andalan yang nantinya dapat menarik sektor-sektor lain untuk ikut tumbuh dan berkembang, sehingga perekonomian juga akan ikut berkembang dengan sendirinya (*self propelling*) secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Kesejahteraan masyarakat juga berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan PDRB. Kesejahteraan masyarakat daerah dapat terwujud dengan mendorong salah satu komponen yang harus diperhatikan yaitu belanja modal. Belanja modal sangat berperan karena sasaran penggunaannya yaitu digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang pada akhirnya nanti dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat. Selain itu, supaya kesejahteraan masyarakat dapat terus berkembang, dibutuhkan dukungan investasi baru sebagai modal. Semakin banyak tabungan yang

diinvestasikan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat, sehingga kesejahteraan masyarakat pun ikut meningkat (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besar variabel dependen (Y) dengan menggunakan data variabel independen (X) yang sudah diketahui besarnya (Gujarati,2004:19). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPM pada suatu wilayah digunakanlah analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross section*, data ini menggambarkan beberapa objek penelitian dalam satu kurun waktu. Hasil regresi linear berganda pengaruh kemiskinan dan kapasitas investasi domestik terhadap IPM dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Regresi Linier Berganda terhadap Variabel Kemiskinan dan Kapasitas Investasi Domestik, dan IPM

Dependent Variable: LOGIPM
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1 37
Included observations: 23 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.230036	0.125550	33.69194	0.0000
LOGPOV	-0.041483	0.009145	-4.535912	0.0002
LOGIS	0.042242	0.008413	5.020910	0.0001
LOGPMDN	-0.009162	0.003847	-2.381744	0.0278
R-squared	0.652042	Durbin-Watson stat		1.309999
F-statistic	11.86808	Prob(F-statistic)		0.000132

Substituted Coefficients:

=====

$$\text{LOGIPM} = 4.23003579804 - 0.0414829570473 \cdot \text{LOGPOV} + 0.0422424442955 \cdot \text{LOGIS} - 0.00916158325049 \cdot \text{LOGPMDN}$$

Sumber : Lampiran B, data diolah.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diperoleh persamaan regresi :

$$\text{Log IPM} = 4.230036 - 0.041483 \text{ Log POV} + 0.042242 \text{ Log GIS} - 0.009162 \text{ Log PMDN} + e.$$

Berikut ini adalah penjelasan secara terperinci dari Persamaan regresi tabel 4.4 :

1. Nilai konstanta sebesar 4,230036. Nilai tersebut menunjukkan bahwa IPM sebesar 4,230036 apabila variabel jumlah penduduk miskin, investasi swasta dan PMDN konstan.
2. Pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap IPM sebesar -0,041483 artinya, apabila terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar satu persen maka akan menurunkan IPM sebesar 0,041483.
3. Pengaruh investasi swasta terhadap IPM sebesar 0,042242 artinya, apabila terjadi peningkatan investasi swasta sebesar satu persen maka akan menaikkan IPM sebesar 0,042242.
4. Pengaruh PMDN terhadap IPM sebesar -0,009162 artinya, apabila terjadi kenaikan PMDN sebesar satu persen akan menurunkan IPM sebesar 0,009162.

4.2.2 Uji Statistik

Setelah persamaan regresi linear berganda, selanjutnya dilakukan pengujian statistik, diantaranya ialah : a) F (uji pengaruh secara simultan); b) uji t (uji pengaruh secara parsial); c) uji R^2 (uji koefisien determinan).

a. Uji F (uji pengaruh secara simultan)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian :

1. Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika nilai F-statistik $>$ F-tabel atau nilai probabilitas F statistik \leq nilai probabilitas α maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara bersama sama variabel independen jumlah penduduk miskin,

investasi swasta dan PMDN berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen IPM;

2. Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika nilai F-statistik < F-tabel atau nilai probabilitas F statistik \geq nilai probabilitas α maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, secara bersama-sama variabel independen jumlah penduduk miskin, investasi swasta dan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen IPM.

Probabilitas F-statistik = 0.000132 \leq nilai probabilitas α = 5%, berarti H_a diterima yang artinya semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen atau secara bersama-sama variabel independen tingkat kemiskinan (POV), investasi swasta (IS) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen IPM.

b. Uji t (uji pengaruh secara parsial)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Kriteria pengujian :

1. Dengan tingkat keyakinan (α) 5% jika nilai probabilitas t-hitung \leq tingkat signifikansi 5% atau nilai t hitung $>$ t tabel. Maka H_0 di tolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh secara parsial variabel independen jumlah penduduk miskin, investasi swasta dan PMDN terhadap variabel dependen IPM;
2. Dengan tingkat keyakinan (α) 5% jika nilai probabilitas t-hitung $>$ tingkat signifikansi 5% atau nilai t hitung $<$ t tabel. Maka H_0 di diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial variabel independen jumlah penduduk miskin, investasi swasta dan PMDN terhadap variabel dependen IPM.

Hasil uji parsial (*t-test*) menunjukkan bahwa pada semua variabel independen, terdapat signifikansi pengaruh perubahan nilai variabel independen secara parsial terhadap perubahan nilai variabel dependen.

Tabel 4.5. Nilai Uji-t terhadap Variabel Jumlah Penduduk Miskin, Investasi Swasta, dan PMDN terhadap IPM

Variabel	Nilai Probabilitas	$\alpha = 5\%$	Keterangan
LOGPOV	0.0002	0,05	Signifikan
LOGIS	0.0001	0,05	Signifikan
LOGPMDN	0.0278	0,05	Signifikan

Sumber : Lampiran C, data diolah.

c. Uji R^2 (uji koefisien determinan).

Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Hasil perhitungan menunjukkan nilai R-squared = 0,652042, artinya IPM kabupaten/kota di Jawa Timur mampu dijelaskan variabel-variabel independen jumlah penduduk miskin, investasi swasta dan PMDN sebesar 65,2% sedangkan sisanya 34,8% dijelaskan variabel lain di luar model.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

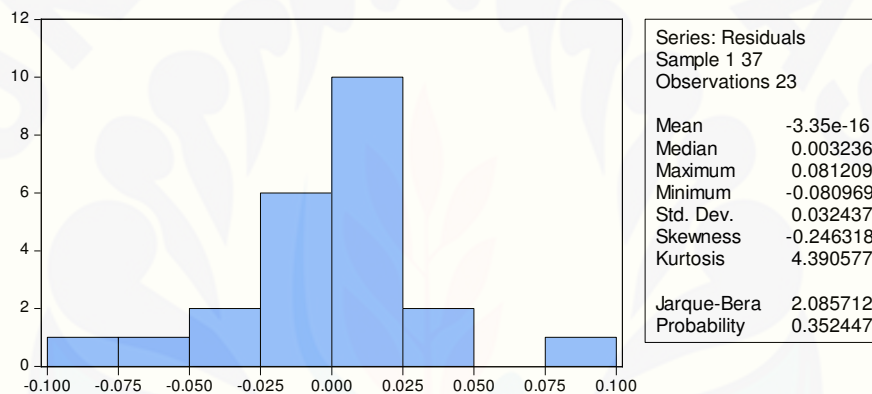
Uji asumsi klasik perlu dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada dasarnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai residual dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-berra test*. Pedoman dari J-B test adalah:

1. Bila nilai JB hitung $>$ nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas J-B hitung \leq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, *error term* adalah berdistribusi normal ditolak;
2. Bila nilai JB hitung $<$ nilai X^2 tabel nilai probabilitas J-B hitung \geq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* adalah terdistribusi normal (Wardhono, 2004).

Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak, dilakukan Uji Jarque-Bera. Hasil Uji J-B Test dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut :



Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Metode Jarque-Bera

Sumber : Lampiran C, data diolah.

Berdasarkan nilai probabilitas X^2 sebesar $0,352447 \geq$ nilai probabilitas $\alpha = 5\%$, dapat disimpulkan bahwa model tersebut terdistribusi normal karena nilai probabilitas X^2 hitung lebih besar dibanding nilai probabilitas $\alpha = 5\%$.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas merupakan keadaan dimana terdapat hubungan linear atau terdapat korelasi antar variabel independen Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat matrik korelasinya. Jika masing-masing variabel bebas berkorelasi lebih besar dari pada 80% maka terdapat penyakit multikolinearitas (wardhono, 2004).

Tabel 4.6. Hasil Uji Mutikoliniearitas pada Data Penelitian

	LOGIPM	LOGPOV	LOGIS	LOGPMDN
LOGIPM	1.000000	-0.435938	0.396122	-0.079947
LOGPOV	-0.435938	1.000000	0.367827	0.223566
LOGIS	0.396122	0.367827	1.000000	0.532973
LOGPMDN	-0.079947	0.223566	0.532973	1.000000

Sumber : Lampiran D, data diolah.

Hasil matrik korelasi terlihat bahwa hubungan antara variabel independen semua berada di bawah 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Konsekuensi logis dari adanya heteroskedastisitas ialah bahwa penaksir tetap tak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Penelitian ini menggunakan uji *White Heterocedasticity*, yang apabila nilai probabilitas *chis-quare* lebih besar dari pada 5% maka H_0 diterima yang artinya model tersebut bersifat homoskedatis.

H_0 : Tidak terdapat Heteroskedastisitas

H_1 : Ada Heteroskedastisitas

Karena probabilitas *chis-quare* lebih besar dari signifikan 5% maka H_0 diterima, yang artinya model tersebut bersifat homoskedatis.

Tabel 4.7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Metode White

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.479922	Prob. F(9,13)	0.8635
Obs*R-squared	5.736020	Prob. Chi-Square(9)	0.7660

Sumber : Lampiran E, data diolah.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah terjadi pada data yang bersifat runtut waktu (*time series*), karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan autokorelasi terjadi pada data yang bersifat antar objek (*cross section*) (Winarno, 2009). Penelitian ini menggunakan Uji Breusch-godfrey untuk menguji ada atau tidaknya masalah autokorelasi dalam model, dengan memperhatikan nilai Obs*R-squared dan nilai *probability* di sebelah kanannya. Apabila nilai *probability* $\geq \alpha=5\%$, berarti tidak ada autokorelasi dalam model.

Tabel 4.8. Hasil Autokorelasi Menggunakan Metode Breusch-Godfrey

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.751380	Prob. F(2,17)	0.4867	Sumber :
Obs*R-squared	1.868018	Prob. Chi-Square(2)	0.3930	

Lampiran F, data diolah.

Nilai Prob. Chi-Square dari hasil hitung diatas sebesar $0,3930 \geq 5\%$. Dapat disimpulkan model tidak terjadi autkorelasi.

4.2.4 Hasil Regresi Investasi Publik dan Investasi Swasta Terhadap IPM

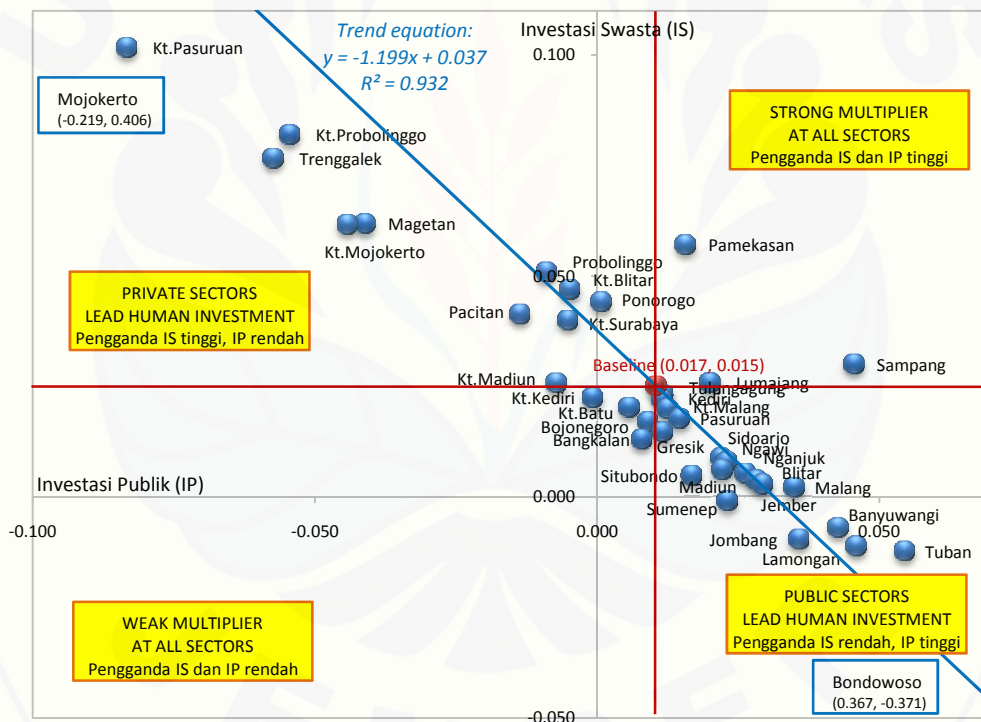
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besar variabel dependen (Y) dengan menggunakan data variabel independen (X) yang sudah diketahui besarnya (Gujarati,2004:19). Untuk mengetahui seberapa besar koefisien variabel investasi publik dan investasi swasta mempengaruhi IPM pada tiap-tiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data, data panel, yaitu data penggabungan dari data *time series* dan *cross section*.

Tabel 4.9. Hasil Regresi Investasi Publik dan Investasi Swasta terhadap IPM per kabupaten/kota di Jawa Timur

No	Kota/Kab.	Koefisien Regresi	
		Investasi Publik	Investasi Swasta
1	Pacitan	-0.013674958	0.041375277
2	Ponorogo	0.000743539	0.044146637
3	Trenggalek	-0.057361030	0.076637712
4	Tulungagung	0.011656394	0.023096579
5	Blitar	0.028157458	0.003873593
6	Kediri	0.011507935	0.022174234
7	Malang	0.034948544	0.002167702
8	Lumajang	0.019994784	0.025894186
9	Jember	0.029335616	0.002886403
10	Banyuwangi	0.042704805	-0.006916416
11	Bondowoso	0.366787285	-0.371426373
12	Situbondo	0.016769899	0.004896230
13	Probolinggo	-0.008979545	0.050902642
14	Pasuruan	0.014597320	0.017767670
15	Sidoarjo	0.022000198	0.008852878
16	Mojokerto	-0.218698625	0.406039195
17	Jombang	0.035757385	-0.009524571
18	Nganjuk	0.026274194	0.005396802
19	Madiun	0.022156308	0.006187009
20	Magetan	-0.041133780	0.061825880
21	Ngawi	0.022953431	0.007969956
22	Bojonegoro	0.009040275	0.017036980
23	Tuban	0.054513074	-0.012225725
24	Lamongan	0.045947426	-0.011116750
25	Gresik	0.011511814	0.014713506
26	Bangkalan	0.007923199	0.013056017
27	Sampang	0.045525580	0.030077024
28	Pamekasan	0.015654601	0.057050967
29	Sumenep	0.023086601	-0.000840980
30	Kota Kediri	-0.000808342	0.022462456
31	Kota Blitar	-0.004818485	0.046901132
32	Kota Malang	0.012470680	0.019944837
33	Kota Probolinggo	-0.054440603	0.081990887
34	Kota Pasuruan	-0.083303079	0.101652886
35	Kota Mojokerto	-0.044249992	0.061642102
36	Kota Madiun	-0.007210098	0.025779261
37	Kota Surabaya	-0.005148668	0.040013428
38	Kota Batu	0.005680466	0.020263361

Sumber : Lampiran G, data diolah

Pengaruh investasi publik (IP) dan investasi swasta (IS) terhadap IPM dapat dilihat dari nilai koefisien regresi per kabupaten/kota di Jawa Timur sebagaimana pada tabel 4.9. Tanda negatif menunjukkan bahwa pengaruh negatif terhadap peningkatan IPM di daerah tersebut dan nilai positif menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan IPM. Hasil pemetaan terhadap koefisien regresi (*multiplier*) variabel IS dan IP dapat mengklasifikasi kabupaten/kota dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (a) kategori daerah dengan sektor swasta sebagai pendorong *human investment*, (b) kategori daerah dengan sektor pemerintah sebagai pendorong *human investment*, (c) kategori daerah dengan pengganda kuat dari kedua sektor, dan (d) kategori daerah dengan pengganda lemah dari kedua sektor.



Gambar 4.2. *Mapping* Nilai Pengganda (*multiplier*) Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Kota/Kabupaten di Jawa Timur

Sumber : Lampiran G, data diolah.

4.3 Pembahasan

Nilai IPM Jawa timur sebesar 73,54 masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan provinsi lain di pulau jawa mengingat Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sebesar 6,55 dengan nilai PDRB Rp 417.612.738,5 juta rupiah pada tahun 2013.

Kemiskinan menjadi faktor penyebab rendahnya IPM di Jawa Timur, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4893 ribu jiwa dengan prosentase penduduk miskin 12,73%. Berdasarkan hasil regresi linier berganda, variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mirza (2012). Adanya pengaruh negatif antara jumlah penduduk miskin dengan IPM, memberi indikasi bahwa IPM di Jawa Timur dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin. Apabila jumlah penduduk miskin meningkat maka IPM akan mengalami penurunan, sebab jumlah penduduk miskin yang tinggi memberikan gambaran bahwa tingkat daya beli masyarakat yang rendah sehingga akan mempengaruhi nilai IPM yang salah satunya dihasilkan dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka akan semakin besar pula nilai IPM. Teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Rukse (1953). Teori ini menjelaskan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal akan mengakibatkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah akan mengakibatkan pendapatan yang diterima juga akan rendah. Pendapatan yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Investasi yang rendah akan berdampak pada keterbelakangan dan seterusnya.

Pengaruh investasi swasta dapat dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan bahwa investasi swasta berpengaruh positif signifikan sebesar 0,042242, artinya setiap kenaikan satu persen investasi swasta maka akan meningkatkan nilai IPM sebesar 0,042242. Jumlah penduduk miskin akan turun apabila penduduknya mempunyai penghasilan, untuk itu dibutuhkan lapangan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran akan menurun. Hal ini sesuai dengan Wagner dalam Mangkoesobroto (1997:172) menyebutkan bahwa: "dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita

meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat”, dengan meningkatnya pendapatan perkapita maka IPM akan naik.

Penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif signifikan dengan koefisien sebesar 0,009162, artinya setiap kenaikan satu persen penanaman modal dalam negeri akan menurunkan nilai IPM sebesar 0,009162. Hal ini berbeda dengan teori bahwa penanaman modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada meningkatnya IPM. Penanaman modal dalam negeri di Jawa Timur menurut sektornya lebih dialokasikan ke sektor sekunder daripada sektor tersier, yang pada dasarnya sektor tersier akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga pengangguran akan berkurang dan kemiskinan akan berkurang sehingga IPM akan naik. Penanaman modal dalam negeri di sektor sekunder menduduki jumlah terbanyak disusul oleh sektor tersier dan primer, nilainya berturut-turut Rp 35.696.326 (juta rupiah), Rp 2.013.309 (juta rupiah) dan Rp 177.309 (juta rupiah).

Hasil regresi pengaruh investasi publik dan swasta terhadap pembangunan manusia yang dilihat dari nilai IPM di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso, Tuban, Lamongan, Banyuwangi, Jombang dan Sumenep variabel investasi publik berpengaruh positif sedangkan investasi swasta berpengaruh negatif terhadap peningkatan pembangunan manusia. Kota Kediri, Blitar, Surabaya, Madiun, Mojokerto, Probolinggo, Pasuruan dan Kabupaten Pacitan, Magetan, Trenggalek, Mojokerto variabel investasi publik berpengaruh negatif sedangkan investasi swasta berpengaruh positif. Kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur variabel investasi publik dan investasi swasta sama-sama berpengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan manusia.

Peningkatan IPM di sebagian besar kota-kota di Jawa Timur lebih didorong oleh peran swasta (*private sectors*) daripada peran pemerintah (*public sectors*), kecuali Kota Malang, Kota Batu, dan Kota Kediri. Wilayah-wilayah ini dapat pula disebut sebagai *welfare society*. Wilayah kota yang masuk kategori tersebut antara lain: Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Blitar, dan Kota Madiun. Wilayah kabupaten yang masuk kategori tersebut antara lain:

Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Implikasinya, peningkatan peran sektor swasta dalam penyediaan layanan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga) akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang salah satu indikatornya adalah peningkatan IPM.

Peningkatan IPM di sebagian besar kabupaten-kabupaten di Jawa Timur lebih didorong oleh peran pemerintah (*public sectors*) daripada peran swasta (*private sectors*). Wilayah-wilayah ini dapat pula disebut sebagai *welfare state*. Wilayah kabupaten yang masuk kategori tersebut antara lain: Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Blitar, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Tuban. Wilayah kota yang masuk kategori tersebut hanya Kota Malang. Implikasinya, peningkatan peran pemerintah dalam penyediaan layanan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga) akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang salah satu indikatornya adalah peningkatan IPM.

Kabupaten/kota dengan pengganda kuat dari kedua sektor pemerintah dan swasta adalah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sampang. Namun rata-rata IPM ketiga kabupaten tersebut dalam 5 tahun terakhir tergolong rendah, masing-masing 68,43; 65,51; dan 60,4. Investasi pemerintah ketiga daerah tersebut relatif lebih rendah dibanding daerah lainnya. Dengan demikian, peningkatan investasi pemerintah dan investasi swasta pada ketiga daerah tersebut diduga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya diindikasikan oleh besaran IPM.

Kabupaten/kota dengan pengganda lemah dari kedua sektor pemerintah dan swasta adalah Kota Kediri, Kota Batu, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Bangkalan. Indikator tersebut menunjukkan rendahnya produktivitas investasi baik

swasta maupun pemerintah dalam mendorong peningkatan IPM. Dengan demikian, peningkatan efektivitas perencanaan dan penganggaran publik (alokasi APBD) dalam penyediaan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga) dipandang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kapasitas investasi domestik dan kemiskinan terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di Jawa Timur serta pengaruh investasi publik dan investasi swasta terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada bab 4, maka dapat disimpulkan :

1. Hasil regresi linier berganda untuk menguji pengaruh kemiskinan dan kapasitas investasi domestik terhadap pembangunan manusia di Jawa Timur adalah secara parsial variabel jumlah penduduk miskin dan PMDN berpengaruh negatif signifikan dan variabel investasi swasta berpengaruh positif signifikan, sedangkan uji simultan semua variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di Jawa Timur.
2. Hasil regresi linear berganda untuk mengkaji pengaruh variabel investasi publik dan investasi swasta terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur adalah Kabupaten Bondowoso, Tuban, Lamongan, Banyuwangi, Jombang dan Sumenep variabel investasi publik berpengaruh positif sedangkan investasi swasta berpengaruh negatif terhadap peningkatan pembangunan manusia. Kota Kediri, Blitar, Surabaya, Madiun, Mojokerto, Probolinggo, Pasuruan dan Kabupaten Pacitan, Magetan, Trenggalek, Mojokerto variabel investasi publik berpengaruh negatif sedangkan investasi swasta berpengaruh positif. Kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur variabel investasi publik dan investasi swasta sama-sama berpengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan manusia.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan investasi swasta terutama investasi yang bersifat pembangunan manusia seperti investasi di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga investasi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga akan meningkatkan nilai IPM yang merata di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.
2. Perlu peningkatan produktivitas dan efektivitas perencanaan dan penganggaran publik (APBD), terutama untuk sektor-sektor strategis dan yang berkaitan dengan pelayanan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga), sehingga dapat mendorong peningkatan IPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur*. <http://jatim.bps.go.id> [diakses pada tanggal 12 Maret 2015].
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional*. <http://www.bps.go.id>. [diakses pada tanggal 12 Maret 2015].
- Badrudin, R., dan Khasanah, M. 2011. Pengaruh Pendapatan dan Balanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi*, 9 (1): 1-82.
- Bank Indonesia. 2014. *Kajian Ekonomi Regional Triwulan IV - 2013*. <http://www.bi.go.id>. [diakses pada tanggal 12 Maret 2015].
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. 2008. *RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009 - 2014*. <http://bappeda.jatimprov.go.id>. [diakses pada tanggal 12 Maret 2015].
- Cahyat, A., Gonner, C., Haug, M., dan Limberg, G. 2007. *Menuju Kesejahteraan: Pemantauan Kemiskinan di Kutai Barat*. Indonesia: CIFOR.
- Darwanto., dan Yustikasari, Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Dernbug, T. F. 1994. *Macroeconomics: Concepts, Theories and Policies*. New York: Mc Graw-Hill Book Company.
- Dumairy. 1997: *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Franciari, P. S. 2012. *Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia (studi Kasus 38 Kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 dan 2010)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*, 8 (3): 144-155.

- Indriantoro dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan. 2012. <http://www.kemenkeu.go.id>. [diakses pada tanggal 24 Maret 2015].
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lugastoro, D. P. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah*. Malang: Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Mangkoesoebroto, G. 1993. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mirza, D. S. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *EDAJ*: 1 (1).
- Moyudan, S. *Jurnal Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE UGM Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 2014. <http://dikmen.kemdikbud.go.id/html/index.php>. [diakses pada tanggal 12 Maret 2015].
- Prasetya, F. 2012. *Teori Pengeluaran Pemerintah*. Modul. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sartika. 2011. *Penerapan Model Pembelajaran Tipe Talking Stick untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Diklat Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan kelas X SMK Swasta Pangeran Antasari Medan T.P. 2010/2011*. Skripsi. Medan: FE Unimed.
- Setyaningrum, D.A. 2013. Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Batik Mustika Blora Berdasarkan Sistem Activity Based Costing (Studi Kasus pada Usaha Batik Mustika Blora). Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Setyowati, L., dan Suparwati, K. Y. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian*

- Anggran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Singarimbun, M., dan Effendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survei I*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Sumanto, T.R.A. 2012. Hubungan Kecerdasan Emosional dan Kemandirian Belajar pada Siswa Kelas XI Jurusan Otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan Sleman. *Jurnal Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Sumiyati, E. S. 2011. Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. *E-Journal Kopertis Wilayah IV*.
- Suparmoko. 2012. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPFE.
- Suryawati, C. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. [http://www.jmpk.online.net/Volume 8/Vol 08 No 03 2005.pdf](http://www.jmpk.online.net/Volume%208/Vol%2008%20No%2003%202005.pdf). [diakses pada tanggal 12 Mei 2012].
- Tanjung, R. A. R. 2007. *Analisis Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Todaro, M. P. 1995. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. 1999. *Economics Development in the Third World*. New York: The Longman Inc.
- Todaro, M. P. dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Vegirawati, T. 2012. Pengaruh Alokasi Belanja Langsung terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatrer Selatan). *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*.
- Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Wardhono, A., dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Yudha, O. R. P. 2013. *Pengaruh Prtumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011*. Skripsi.Semarang: Universitas Negeri Semarang.



LAMPIRAN A

Data IPM, jumlah penduduk miskin, investasi swasta, PMDN dan Investasi Publik kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2013

Kabupaten/Kota	IPM (Poin)	POV (Jiwa)	IS (000 000 Rp)	PMDN (000 000 Rp)	IP (000 000 Rp)
Pacitan	73.36	91347	2406606	25890	312034
Ponorogo	72.61	102591	2984535	0	422864
Trenggalek	74.44	92422	1552425	2688	390052
Tulungagung	74.79	91285	4049286	21079	502251
Blitar	74.92	119794	3212613	0	545488
Kediri	73.29	201870	10242467	62439	516019
Malang	72.34	287404	11437964	2515089	948988
Lumajang	69.50	123895	2821650	0	376629
Jember	66.60	277390	8428493	86000	890049
Banyuwangi	71.02	151604	7180750	894018	706743
Bondowoso	63.59	114796	2415802	0	490054
Situbondo	65.73	89975	2766516	4020640	496073
Probolinggo	65.19	237760	3108275	0	482939
Pasuruan	69.77	175006	9362836	1209858	675322
Sidoarjo	78.15	137623	30788883	2544860	1119170
Mojokerto	78.66	116084	7199270	1349695	573863
Jombang	74.47	136983	4699565	62500	532389
Nganjuk	72.49	140184	2946243	12450	511062
Madiun	71.46	83359	2253666	87095	377186
Magetan	74.34	76017	2520285	0	347098
Ngawi	70.86	126971	2721474	0	408488
Bojonegoro	68.32	196035	4729211	0	983633
Tuban	70.04	196089	4410719	1904000	570368
Lamongan	71.81	191253	3816318	374090	542061
Gresik	76.36	170909	38155706	19657252	904555
Bangkalan	66.19	217418	1919847	1191143	705256
Sampang	62.39	247168	986858	0	455252
Pamekasan	67.17	153103	1867764	0	461028
Sumenep	66.89	224553	1873094	0	476624
Kota Kediri	77.80	22710	10493423	0	381639
Kota Blitar	78.70	10052	1081677	0	299269
Kota Malang	78.78	40863	12247092	75000	737141
Kota Probolinggo	75.94	38960	2066551	11100	320670
Kota Pasuruan	74.75	14572	2178621	133559	254919
Kota Mojokerto	78.66	8219	2227635	0	271437
Kota Madiun	78.17	8705	2918667	1038184	355678
Kota Surabaya	78.97	168690	131806091	1675833	3078334
Kota Batu	76.09	9344	663174	0	279192
Jawa Timur	73.54	4893007	348542055	38954462	22702089

Sumber : BPJ Jawa Timur, Bank Indonesia dan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

LAMPIRAN B

Hasil uji regresi data cross section

Dependent Variable: LOGIPM

Method: Least Squares

Date: 05/30/15 Time: 01:10

Sample (adjusted): 1 37

Included observations: 23 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.230036	0.125550	33.69194	0.0000
LOGPOV	-0.041483	0.009145	-4.535912	0.0002
LOGIS	0.042242	0.008413	5.020910	0.0001
LOGPMDN	-0.009162	0.003847	-2.381744	0.0278

R-squared	0.652042	Mean dependent var	4.294122
Adjusted R-squared	0.597101	S.D. dependent var	0.054988
S.E. of regression	0.034904	Akaike info criterion	-3.715687
Sum squared resid	0.023147	Schwarz criterion	-3.518210
Log likelihood	46.73040	Hannan-Quinn criter.	-3.666022
F-statistic	11.86808	Durbin-Watson stat	1.309999
Prob(F-statistic)	0.000132		

Estimation Command:

```
=====
LS LOGIPM C LOGPOV LOGIS LOGPMDN
```

Estimation Equation:

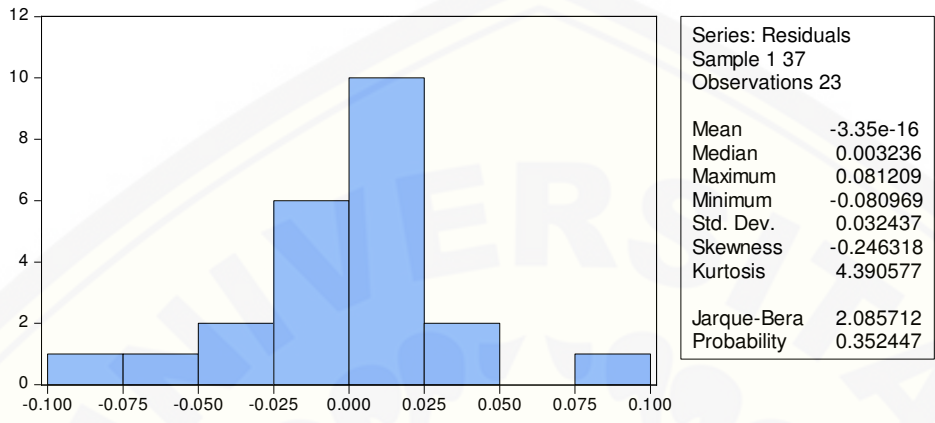
```
=====
LOGIPM = C(1) + C(2)*LOGPOV + C(3)*LOGIS + C(4)*LOGPMDN
```

Substituted Coefficients:

```
=====
LOGIPM = 4.23003579804 - 0.0414829570473*LOGPOV + 0.0422424442955*LOGIS -
0.00916158325049*LOGPMDN
```


LAMPIRAN C

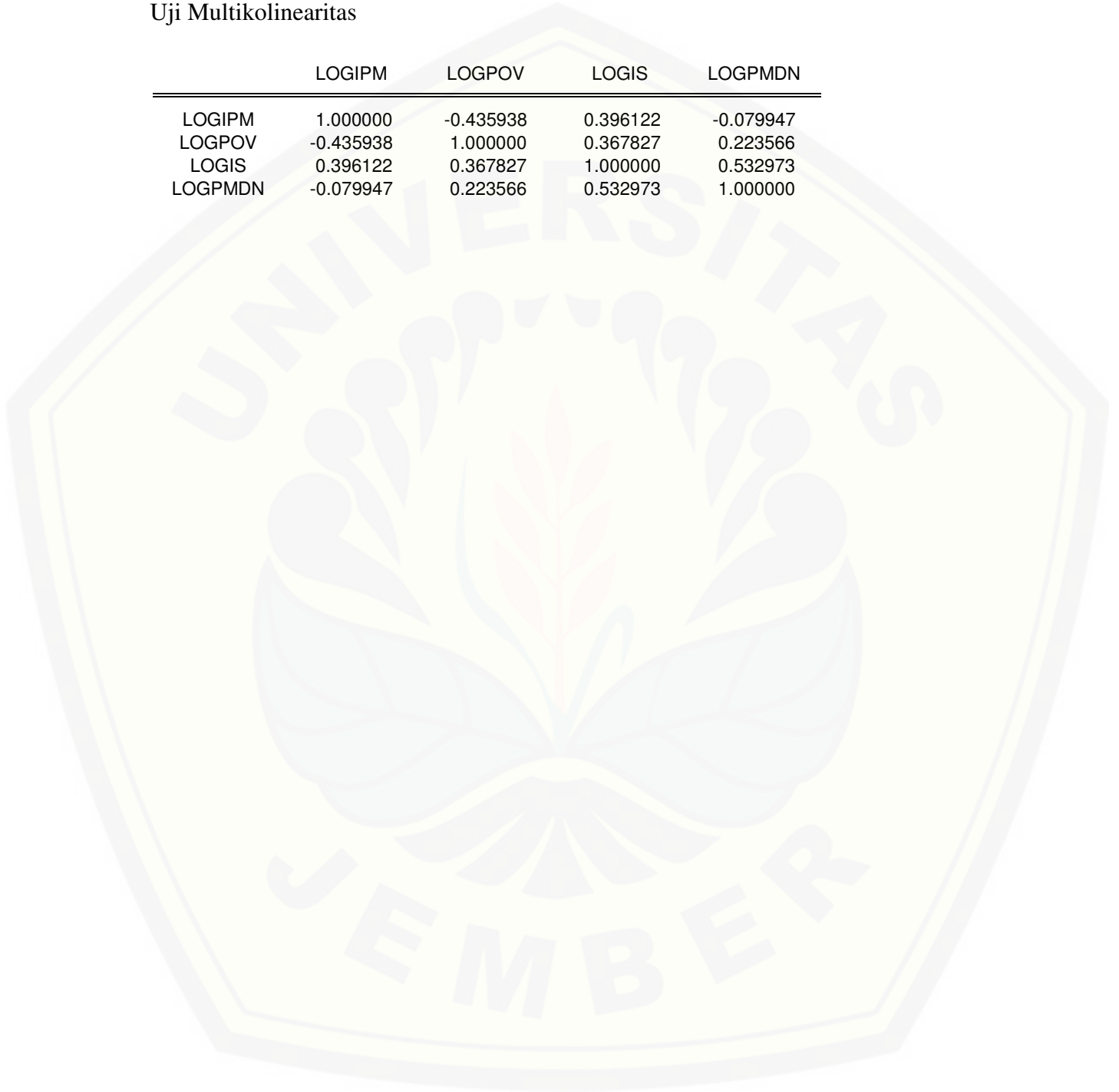
Uji Normalitas



LAMPIRAN D

Uji Multikolinearitas

	LOGIPM	LOGPOV	LOGIS	LOGPMDN
LOGIPM	1.000000	-0.435938	0.396122	-0.079947
LOGPOV	-0.435938	1.000000	0.367827	0.223566
LOGIS	0.396122	0.367827	1.000000	0.532973
LOGPMDN	-0.079947	0.223566	0.532973	1.000000



LAMPIRAN E

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.479922	Prob. F(9,13)	0.8635
Obs*R-squared	5.736020	Prob. Chi-Square(9)	0.7660
Scaled explained SS	6.635991	Prob. Chi-Square(9)	0.6750

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 05/30/15 Time: 03:38

Sample: 1 37

Included observations: 23

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.003880	0.181254	-0.021408	0.9832
LOGPOV	-0.001700	0.018759	-0.090607	0.9292
LOGPOV^2	-0.000768	0.000764	-1.005649	0.3329
LOGPOV*LOGIS	0.001571	0.001329	1.182544	0.2582
LOGPOV*LOGPMDN	-0.000390	0.000426	-0.916103	0.3763
LOGIS	-0.005347	0.015287	-0.349767	0.7321
LOGIS^2	-0.000249	0.000384	-0.648400	0.5280
LOGIS*LOGPMDN	-0.000380	0.000509	-0.746539	0.4686
LOGPMDN	0.008483	0.005823	1.456856	0.1689
LOGPMDN^2	8.26E-05	0.000171	0.483525	0.6368
R-squared	0.249392	Mean dependent var		0.001006
Adjusted R-squared	-0.270259	S.D. dependent var		0.001895
S.E. of regression	0.002136	Akaike info criterion		-9.161210
Sum squared resid	5.93E-05	Schwarz criterion		-8.667517
Log likelihood	115.3539	Hannan-Quinn criter.		-9.037048
F-statistic	0.479922	Durbin-Watson stat		2.638186
Prob(F-statistic)	0.863462			

LAMPIRAN F

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.751380	Prob. F(2,17)	0.4867
Obs*R-squared	1.868018	Prob. Chi-Square(2)	0.3930

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 05/30/15 Time: 03:38

Sample: 1 37

Included observations: 23

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.014980	0.128712	-0.116383	0.9087
LOGPOV	0.000766	0.010018	0.076459	0.9399
LOGIS	0.000514	0.008549	0.060176	0.9527
LOGPMDN	-0.000216	0.004309	-0.050145	0.9606
RESID(-1)	0.283320	0.278129	1.018663	0.3226
RESID(-2)	-0.128242	0.352854	-0.363441	0.7208
R-squared	0.081218	Mean dependent var		-3.35E-16
Adjusted R-squared	-0.189012	S.D. dependent var		0.032437
S.E. of regression	0.035369	Akaike info criterion		-3.626481
Sum squared resid	0.021267	Schwarz criterion		-3.330265
Log likelihood	47.70453	Hannan-Quinn criter.		-3.551983
F-statistic	0.300552	Durbin-Watson stat		1.742880
Prob(F-statistic)	0.905787			

LAMPIRAN G

Hasil regresi setiap kabupaten/kota di Jawa Timur data *time series*

1. Kabupaten Pacitan

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.676276	0.007127	235.1986	0.002707
X Variable 1	-0.01367	0.002511	-5.44689	0.11559
X Variable 2	0.041375	0.002871	14.41392	0.044096

2. Kabupaten Ponorogo

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.570317	0.049339	31.82712	0.019996
X Variable 1	0.000744	0.025616	0.029026	0.981527
X Variable 2	0.044147	0.028006	1.576311	0.359897

3. Kabupaten Trenggalek

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.717599	0.020423	84.10031	0.007569
X Variable 1	-0.05736	0.051398	-1.11602	0.465131
X Variable 2	0.076638	0.047809	1.602999	0.35508

4. Kabupaten Tulungagung

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.654309	0.022327	74.09567	0.008591
X Variable 1	0.011656	0.006055	1.92496	0.305016
X Variable 2	0.023097	0.006799	3.397262	0.182245

5. Kabupaten Blitar

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.687611	0.015993	105.5198	0.006033
X Variable 1	0.028157	0.003089	9.115152	0.069564
X Variable 2	0.003874	0.001769	2.189134	0.272789

6. Kabupaten Kediri

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.64376	0.00613	268.132	0.002374
X Variable 1	0.011508	0.001659	6.936877	0.091145
X Variable 2	0.022174	0.001324	16.75063	0.037961

7. Kabupaten Malang

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.634874	0.033646	48.59059	0.0131
X Variable 1	0.034949	0.014988	2.331753	0.257918
X Variable 2	0.002168	0.010985	0.197332	0.875968

8. Kabupaten Lumajang

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.562703	0.014739	106.0258	0.006004
X Variable 1	0.019995	0.005505	3.631888	0.171048
X Variable 2	0.025894	0.005623	4.605253	0.136125

9. Kabupaten Jember

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.628123	0.066658	24.42521	0.02605
X Variable 1	0.029336	0.004919	5.96415	0.105757
X Variable 2	0.002886	0.008988	0.321137	0.802181

10. Kabupaten Banyuwangi

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.64925	0.024411	67.56171	0.009422
X Variable 1	0.042705	0.005755	7.420051	0.085283
X Variable 2	-0.00692	0.003513	-1.96886	0.299182

11. Kabupaten Bondowoso

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	2.088575	0.18823	11.09586	0.05722
X Variable 1	0.366787	0.146347	2.506288	0.241687
X Variable 2	-0.37143	0.157187	-2.36295	0.254867

12. Kabupaten Situbondo

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.688902	0.030827	54.78692	0.011619
X Variable 1	0.01677	0.012006	1.396831	0.395546
X Variable 2	0.004896	0.006309	0.776089	0.579837

13. Kabupaten Probolinggo

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.534224	0.012671	121.0851	0.005258
X Variable 1	-0.00898	0.004674	-1.92121	0.305525
X Variable 2	0.050903	0.004654	10.93716	0.058046

14. Kabupaten Pasuruan

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.625769	0.093893	17.31511	0.036726
X Variable 1	0.014597	0.020531	0.710987	0.60653
X Variable 2	0.017768	0.004591	3.8698	0.160988

15. Kabupaten Sidoarjo

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.691249	0.004385	385.6711	0.001651
X Variable 1	0.022	0.000839	26.20878	0.024279
X Variable 2	0.008853	0.000826	10.71797	0.059226

16. Kabupaten Mojokerto

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	0.276892	1.570122	0.176351	0.888874
X Variable 1	-0.2187	0.353473	-0.61871	0.647271
X Variable 2	0.406039	0.507136	0.800652	0.570194

17. Kabupaten Jombang

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.730503	0.051124	33.84896	0.018802
X Variable 1	0.035757	0.004042	8.845801	0.071664
X Variable 2	-0.00952	0.006051	-1.57404	0.360313

18. Kabupaten Nganjuk

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.674507	0.065036	25.74723	0.024713
X Variable 1	0.026274	0.009676	2.715393	0.224636
X Variable 2	0.005397	0.01665	0.324139	0.80045

19. Kabupaten Madiun

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.690046	0.056987	29.65646	0.021458
X Variable 1	0.022156	0.034865	0.635491	0.639604
X Variable 2	0.006187	0.034684	0.178383	0.88762

20. Kabupaten Magetan

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.702734	0.035234	48.32668	0.013171
X Variable 1	-0.04113	0.025605	-1.60647	0.354462
X Variable 2	0.061826	0.021209	2.915085	0.21038

21. Kabupaten Ngawi

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.668572	0.052998	31.48344	0.020214
X Variable 1	0.022953	0.011254	2.039615	0.290202
X Variable 2	0.00797	0.008809	0.904753	0.531808

22. Kabupaten Bojonegoro

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.665821	0.01837	90.68141	0.00702
X Variable 1	0.00904	0.002853	3.168978	0.194595
X Variable 2	0.017037	0.005196	3.279051	0.188444

23. Kabupaten Tuban

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.616053	0.07677	21.05052	0.03022
X Variable 1	0.054513	0.022156	2.460423	0.245761
X Variable 2	-0.01223	0.013415	-0.91136	0.529504

24. Kabupaten Lamongan

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.66555	0.036843	45.2068	0.01408
X Variable 1	0.045947	0.009516	4.828638	0.130005
X Variable 2	-0.01112	0.007533	-1.4757	0.379148

25. Kabupaten Gresik

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.699136	0.083005	20.47028	0.031075
X Variable 1	0.011512	0.020993	0.548373	0.680676
X Variable 2	0.014714	0.024285	0.605856	0.653224

26. Kabupaten Bangkalan

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.68838	0.036111	46.75592	0.013614
X Variable 1	0.007923	0.011787	0.672207	0.62323
X Variable 2	0.013056	0.00767	1.702322	0.338127

27. Kabupaten Sampang

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.355148	0.109232	12.40616	0.051204
X Variable 1	0.045526	0.027443	1.658938	0.345349
X Variable 2	0.030077	0.009207	3.266831	0.189108

28. Kabupaten Pamekasan

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.379908	0.164952	8.365528	0.075741
X Variable 1	0.015655	0.031823	0.491928	0.708957
X Variable 2	0.057051	0.051738	1.102689	0.468934

29. Kabupaten Sumenep

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.698692	0.027925	60.83	0.010465
X Variable 1	0.023087	0.005088	4.53781	0.138085
X Variable 2	-0.00084	0.002428	-0.34634	0.787744

30. Kota Kediri

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.73777	0.002984	582.4191	0.001093
X Variable 1	-0.00081	0.000753	-1.0733	0.477503
X Variable 2	0.022462	0.000321	69.96617	0.009098

31. Kota Blitar

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.639028	0.025175	65.10557	0.009777
X Variable 1	-0.00482	0.004739	-1.01669	0.49473
X Variable 2	0.046901	0.00689	6.806799	0.092863

32. Kota Malang

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.682213	0.046261	36.3637	0.017503
X Variable 1	0.012471	0.015205	0.820185	0.562688
X Variable 2	0.019945	0.018335	1.087829	0.473235

33. Kota Probolinggo

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.662235	0.000149	11177.11	5.7E-05
X Variable 1	-0.05444	6.3E-05	-864.38	0.000737
X Variable 2	0.081991	3.63E-05	2259.894	0.000282

34. Kota Pasuruan

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.67689	0.067405	24.87798	0.025576
X Variable 1	-0.0833	0.116522	-0.71491	0.604873
X Variable 2	0.101653	0.094092	1.080359	0.475421

35. Kota Mojokerto

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.744985	0.011519	151.491	0.004202
X Variable 1	-0.04425	0.004425	-9.99898	0.063457
X Variable 2	0.061642	0.002435	25.31216	0.025138

36. Kota Madiun

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.763132	0.012059	146.2058	0.004354
X Variable 1	-0.00721	0.006035	-1.19465	0.443683
X Variable 2	0.025779	0.004214	6.116945	0.103162

37. Kota Surabaya

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.605181	0.00751	213.7296	0.002979
X Variable 1	-0.00515	0.000878	-5.86383	0.107533
X Variable 2	0.040013	0.001279	31.27348	0.02035

38. Kota Batu

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	1.732397	0.014422	120.1182	0.0053
X Variable 1	0.00568	0.003086	1.840746	0.316815
X Variable 2	0.020263	0.001836	11.0356	0.057531